

Laporan

NATIONAL KAWULA17 SURVEY (NKS) Q2 2026

Kinerja Pemerintah dan Legislatif
serta Opini Orang Muda



Daftar Isi

<u>Perkenalan.....</u>	<u>3</u>
<u>Metodologi.....</u>	<u>4</u>
<u>Temuan.....</u>	<u>8</u>
<u>Isu Prioritas.....</u>	<u>19</u>
<u>Penilaian Kinerja Pemerintah.....</u>	<u>25</u>
<u>Ekspektasi terhadap Pemerintahan.....</u>	<u>35</u>
<u>Pantauuan Partai Politik.....</u>	<u>39</u>
<u>Opini Publik terhadap RUU Berjalan.....</u>	<u>44</u>
<u>Persepsi terhadap perekonomian Indonesia.....</u>	<u>53</u>
<u>Ketertarikan orang muda terhadap isu.....</u>	<u>58</u>
<u>Lampiran.....</u>	<u>61</u>



Sumber: Storyset

Tentang Kami

Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas

Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) lahir dari kekhawatiran sekaligus harapan kami untuk meningkatkan partisipasi orang muda di arena politik. Politik yang kami bayangkan tidak melulu tentang jalur formal, tetapi juga tentang memahami pilihan politik yang termanifestasi dalam pilihan hidup sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi orang muda, PP17 memiliki beberapa inisiatif program, di antaranya **Survei Nasional Kawula17** yang kami lakukan setiap kuartal untuk memantau posisi partai politik dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu terkini. Pemantauan reguler ini dilakukan untuk memetakan dan memberikan gambaran yang representatif mengenai posisi masyarakat Indonesia terkait isu-isu terkini yang juga dibahas di DPR.

PP17 juga meluncurkan **Kawula17.id** yang merupakan [Voting Advice Application \(VAA\)](#). Melalui Kawula17.id, (calon) pemilih bisa memeriksa pilihan partai politik yang paling sesuai dengan nilai-nilai politik pemilih berdasarkan isu sosial ekonomi yang diusung oleh partai tersebut dalam kurun waktu tertentu. Isu-isu yang diangkat harus relevan dengan kebutuhan pemilih dan dinamis.

National Kawula17 Survey (NKS)

National Kawula17 Survey (NKS) atau Survei Nasional Kawula17 bertujuan untuk mendorong diskusi serta meningkatkan kesadaran orang muda dan pemerintah terhadap kondisi terkini. NKS dilakukan 4 kali dalam setahun untuk melihat tren yang terjadi pada orang muda. Publikasi setiap laporan NKS dapat diakses melalui situs **Kawula17.id**.

Pada kuartal kedua tahun ini, Kawula17 mempublikasikan laporan NKS yang berisi tentang:

1. Isu prioritas orang muda.
2. Penilaian kinerja pemerintah.
3. Ekspektasi terhadap pemerintah.
4. Monitoring partai politik.
5. Opini orang muda terkait beberapa RUU di Prolegnas.
6. Persepsi orang muda terkait perekonomian nasional.



Metodologi



Desain Penelitian

Tujuan



- Memahami sikap masyarakat terhadap:
- ✓ Isu terkini yang sedang berkembang.
 - ✓ Program dan kinerja pemerintah.
 - ✓ Prioritas isu untuk segera diselesaikan.
 - ✓ Beberapa RUU yang masuk dalam Prolegnas.
 - ✓ Persepsi masyarakat terhadap perekonomian nasional.

Periode



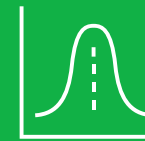
19 – 21 Juni 2026

Metode



Computer-Assisted Self-Interviewing (CASI)
atau survei daring

Sampling



n = 409 responden*
Umur: 17 – 35 tahun
Area: Indonesia

**representatif untuk Indonesia*

Profil Responden

base: semua, n = 409*

Jenis kelamin	
Perempuan	51%
Laki-laki	49%

Umur	
17 – 25 tahun	50%
26 – 35 tahun	50%

Pendidikan	
SMP/SMA	85%
Perguruan Tinggi	15%

Wilayah	
Sumatera	22%
Jawa	56%
Lainnya	22%

Area	
Perkotaan	41%
Pedesaan	59%

**Untuk memastikan hasil yang representatif bagi Indonesia, data telah diberi bobot berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah. Agar “effective base” optimal, faktor bobot dibuat di bawah 2. Pemahaman tentang bobot (weight) terlampir dalam bagian lampiran.*

Limitasi, Area, dan Penjelasan Metodologi Penelitian

Limitasi Penelitian

Berbeda dengan kuartal-kuartal sebelumnya yang mencakup profil masyarakat Indonesia berusia 17–44 tahun, National Kawula17 Survey Q2 2026 berfokus pada kelompok orang muda berusia 17–35 tahun. **Perubahan cakupan demografi ini dapat memengaruhi karakteristik dan variasi respons yang diperoleh dalam survei kuartal ini.**

Perubahan ini dilakukan agar dapat lebih memahami perspektif generasi yang akan mengalami dampak kebijakan pemerintah lebih lama dan memiliki peran krusial dalam menentukan masa depan Indonesia.

Area Penelitian

Klasifikasi area responden dibedakan menjadi **kawasan perkotaan** dan **kawasan pedesaan**:

- ✓ Perkotaan didefinisikan sebagai wilayah kelurahan atau kota dengan densitas penduduk tinggi, didukung oleh ketersediaan fasilitas publik yang memadai serta konektivitas internet yang stabil.
- ✓ Pedesaan mengacu pada wilayah desa, dusun, atau pemukiman agraris dengan keterbatasan fasilitas umum, letak geografis yang jauh dari pusat aktivitas kota, dan kendala akses jaringan internet

Weighting

Proses pemberian bobot pada responden agar komposisi hasil survei lebih sesuai dengan populasi yang diteliti. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyeimbangkan komposisi sampel, membuat hasil survei lebih mewakili populasi, dan mengurangi pengaruh kelompok yang jumlahnya terlalu banyak atau terlalu sedikit.

Quality Control

Proses pemeriksaan kualitas data untuk memastikan bahwa jawaban responden akurat, konsisten, dan sesuai dengan informasi yang diberikan saat pertama kali mengisi survei. Proses *quality control* (QC) dilakukan dengan menghubungi kembali sekitar 20% responden untuk memverifikasi pelaksanaan survei serta kesesuaian jawaban yang dicatat.

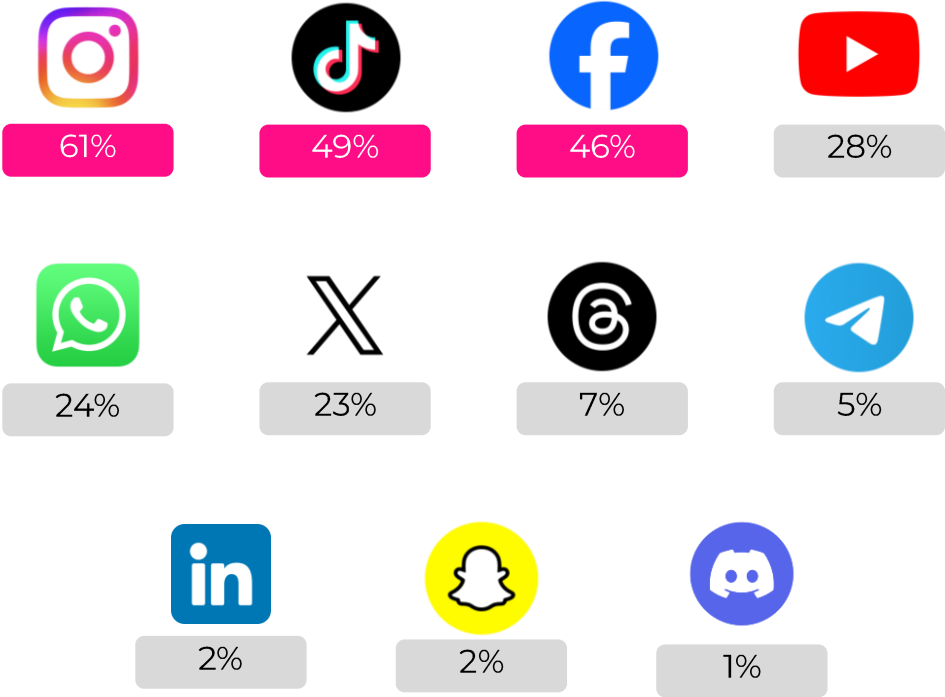
Dalam survei ini, verifikasi mencakup informasi mengenai usia, tempat tinggal, pendidikan, penilaian terhadap pemerintah, topik yang dianggap paling penting, isu lingkungan, serta dampak perubahan nilai tukar rupiah. Pemeriksaan juga mencakup identifikasi pola jawaban yang terlalu seragam dan waktu pengisian yang terlalu cepat. Seluruh proses QC dilakukan sebelum tahap analisis statistik untuk memastikan bahwa hanya data yang memenuhi standar kualitas yang digunakan dalam analisis.

Mayoritas orang muda menggunakan media sosial (71%) sebagai sumber utama informasi, dengan 61% di antaranya menggunakan Instagram.

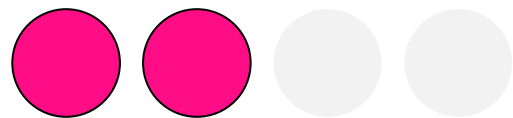
Sumber informasi utama
base: semua, n= 409

Sumber informasi	Total
Media sosial	71%
Artikel berita online	33%
Televisi	33%
Teman atau keluarga	27%
Komunitas atau organisasi	9%
Tempat kerja	9%
Koran/majalah	8%
Sekolah/kampus	8%
Artificial Intelligence (AI)	8%
Radio	5%

Kanal media sosial yang digunakan
base: media sosial sebagai sumber informasi, n= 292



\$IK01_mr Bagaimana Anda pertama kali mengetahui dan mendapatkan informasi?
\$IK02_mr Manakah kanal media sosial dan komunikasi yang paling sering Anda gunakan untuk mendapatkan informasi?



Temuan



Temuan (1)



Isu prioritas masyarakat

Dalam tiga bulan terakhir, berbagai persoalan ekonomi menjadi perhatian utama bagi orang muda di Indonesia. Fokus pada isu ekonomi (60%) tampak jauh lebih kuat dibandingkan dengan perhatian terhadap kemiskinan (41%). Temuan NKS Q2 2026 menunjukkan kekhawatiran terhadap melemahnya nilai tukar rupiah (45%) dan kenaikan harga BBM (41%).

Selain memperhatikan isu-isu ekonomi, orang muda juga menyoroti berbagai isu lingkungan, terutama proyek pertambangan yang merusak lingkungan (37%), perampasan hutan adat (33%), dan ekspansi sawit di wilayah Papua (31%).



Ekspektasi terhadap pemerintah

Keyakinan orang muda terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencatatkan skor terendah pada Q2 2026 (-27%). Penilaian keyakinan tersebut terbagi menjadi (sangat) yakin (22%), agak yakin (29%), dan (sangat) tidak yakin (49%).

Menariknya, penegakan korupsi menjadi alasan utama bagi mereka yang merasa yakin (42%) dan tidak yakin (52%) terhadap pemenuhan program dan kebijakan Prabowo-Gibran. Ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang bagi orang muda mengenai kasus korupsi, baik dalam pemberantasannya maupun dalam maraknya kasus yang terjadi.



Penilaian kinerja pemerintah

Seperti ekspektasi, kinerja pemerintah pada kuartal ini juga mencatatkan skor terendah (4,2 poin) dalam skala 1-10 dan terus menurun sejak akhir 2025. Penurunan nilai kinerja ini juga sejalan dengan penilaian buruk orang muda terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah terkini maupun program *quick-win* yang didorong sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Orang muda menunjukkan kepuasan yang sangat rendah terhadap program Makan Bergizi Gratis (-26%). Penilaian ini menurun secara signifikan dibandingkan dengan Q1 2026 (7%). Ketidakpuasan ini diikuti oleh penurunan kepuasan terhadap seluruh program *quick-win* Prabowo-Gibran.

Penilaian rendah juga tampak pada program dan kebijakan terkini pemerintah, terutama pada kenaikan harga BBM (66%) dan 19 juta lapangan pekerjaan (60%). Dari 10 program dan kebijakan terkini pemerintah selama Q2 2026, ketidakpuasan tetap mewarnai penilaian orang muda terhadap kinerja Prabowo-Gibran.

Temuan (2)



Pantauan partai politik

Sejalan dengan penilaian kinerja pemerintah yang semakin rendah, suara Partai Gerindra menunjukkan penurunan yang konsisten sejak Q4 2025 (38%) hingga mencapai 14% pada Q2 2026. Orang muda saat ini belum menunjukkan ketertarikan terhadap partai-partai politik nonparlemen.



Opini publik terhadap RUU berjalan

Pada lima RUU Prolegnas yang dianalisis dalam NKS Q2 2026, terlihat perbedaan pandangan antara orang muda dan partai politik di parlemen. Salah satunya tampak dalam UU Polri yang disahkan pada 9 Juni 2026. Sebanyak 49% orang muda berpendapat bahwa anggota polisi aktif seharusnya hanya menjalankan fungsi keamanan, bukan menjalankan tugas pemerintahan. Namun, semua partai politik di parlemen belum memiliki posisi yang sama dengan aspirasi orang muda.

Sebanyak 68% orang muda menilai anggaran pendidikan lebih tepat diprioritaskan untuk kegiatan belajar, kesejahteraan guru, dan kualitas sekolah daripada untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, mayoritas partai di parlemen mengambil posisi yang berbeda dari pandangan orang muda dalam RUU Sisdiknas.



Indeks Partai Politik

Indeks Partai Politik pada Q2 2026 ditentukan berdasarkan sikap partai politik dan opini masyarakat terhadap lima RUU Prolegnas. Secara umum, skor indeks partai pada lima RUU berada pada kisaran 24–39 (skala 0–100). Skor yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa posisi partai terhadap lima RUU tersebut belum sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan orang muda saat ini.

Partai Politik	Indeks per kuartal (skala 0-100)				
	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026
Demokrat	37,8	42,0	20,5	33,9	28,0
NasDem	37,8	28,6	23,8	23,1	29,1
PKB	37,6	39,1	30,8	29,8	24,3
PDIP	36,5	51,2	43,2	33,9	38,6
Golkar	36,5	31,2	25,0	33,9	39,0
PKS	35,5	47,6	27,8	34,4	24,6
Gerindra	31,7	47,6	25,0	34,8	29,1
PAN	27,9	41,9	20,8	27,3	26,7

Temuan (3)



Persepsi terhadap situasi ekonomi nasional

Di tengah ramainya perbincangan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah, orang muda menilai bahwa hal tersebut (sangat) berpengaruh (72%) dalam kehidupan sehari-hari mereka. Orang muda merasa bahwa semakin mahalnya harga BBM (48%), meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari (48%), dan meningkatnya harga bahan dan pangan (46%) merupakan dampak utama melemahnya nilai tukar rupiah.

Di tengah peliknya situasi perekonomian saat ini, orang muda menganggap golongan miskin dan rentan (41%) perlu menjadi prioritas utama untuk mendapatkan subsidi pemerintah. Lebih lanjut, janji pemerintah untuk menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan (46%) dianggap perlu menjadi prioritas saat ini.

Temuan-temuan ini menunjukkan dua hal: (1) orang muda menilai lapangan pekerjaan harus menjadi prioritas utama dalam anggaran negara, dan (2) prioritas tersebut bertolak belakang dengan fokus pemerintah saat ini yang lebih mengunggulkan program Makan Bergizi Gratis.



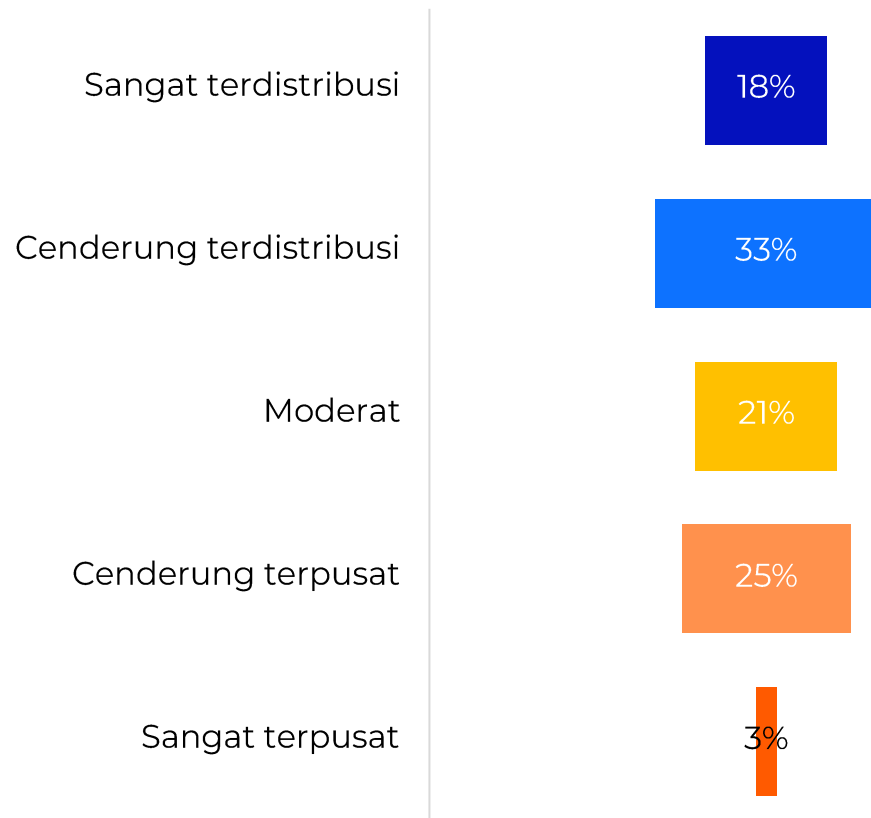
Sumber: Storyset

1 Segmentasi

Spektrum Terdistribusi-Terpusat

Spektrum kewenangan terdistribusi vs terpusat

base: semua, n= 409



Spektrum terdistribusi-terpusat menggambarkan preferensi orang muda terhadap kewenangan pemerintah yang terpusat dan terbagi atau terdistribusi. Individu yang berada pada spektrum (sangat) terdistribusi cenderung mendukung pembagian kewenangan yang lebih terdistribusi, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sebaliknya, individu pada spektrum (sangat) terpusat lebih mendukung pemusatan kewenangan pada pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Skala ini dibuat berdasarkan posisi orang muda dalam RUU Komoditas Strategis, RUU Sistem Pendidikan Nasional, penilaian kinerja dalam pembentukan Badan Penerimaan Negara, pembangunan Proyek Strategis Nasional, serta alasan yakin atau tidak yakin terhadap pemerintah berdasarkan aspek yang menunjukkan adanya kewenangan terpusat.

Hasil NKS Q2 2026 menunjukkan bahwa responden dengan kecenderungan spektrum terdistribusi cenderung lebih kritis terhadap kinerja pemerintah pusat, sementara mereka yang mendukung kewenangan terpusat memberikan penilaian yang lebih positif. **Secara umum, spektrum ini menunjukkan bahwa orang muda cenderung menginginkan pemerintahan yang lebih tersebar dan terdistribusi (51%) dalam berbagai aspek program dan kebijakan.**

Sangat terdistribusi

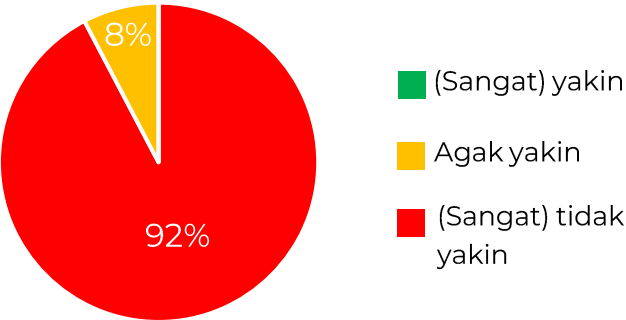
Demografi & profil sangat terdistribusi



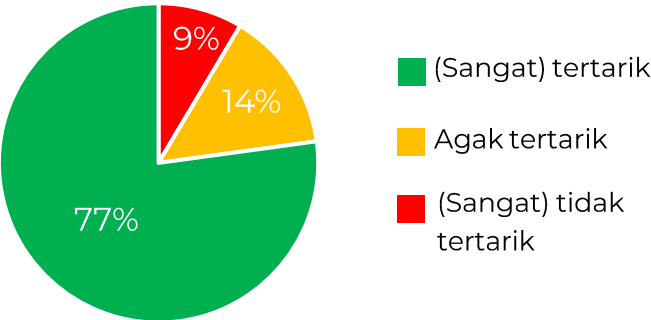
Penilaian terhadap kinerja pemerintah pusat

1.8

Keyakinan terhadap pemerintah base: sangat terdistribusi, n=72



Ketertarikan terlibat dalam isu demokrasi base: sangat terdistribusi, n=72



Ketertarikan terhadap isu

base: sangat terdistribusi, n=56

Alasan ingin terlibat	
Merasa isu tersebut penting	51%
Merasa punya tanggung jawab	37%
Sering melihat isu di media sosial	30%
Ingin belajar hal baru	25%
Ingin membantu kelompok rentan	19%

Ketidaktertarikan terhadap isu

base: sangat terdistribusi, n=16

Alasan belum ingin terlibat	
Takut berbeda pendapat	28%
Tidak punya waktu	23%
Merasa tidak punya kemampuan	15%
Takut dianggap sok tahu	14%
Kurang informasi	14%

Cenderung terdistribusi

Demografi & profil cenderung terdistribusi

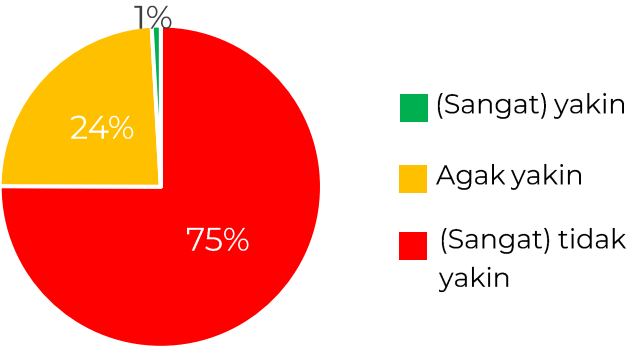
33%	
Perempuan	50%
Laki-laki	50%
17-25	58%
26-35	42%
Sumatera	22%
Jawa	64%
Lainnya	14%
Perkotaan	41%
Pedesaan	59%

Penilaian terhadap kinerja pemerintah pusat

3.1

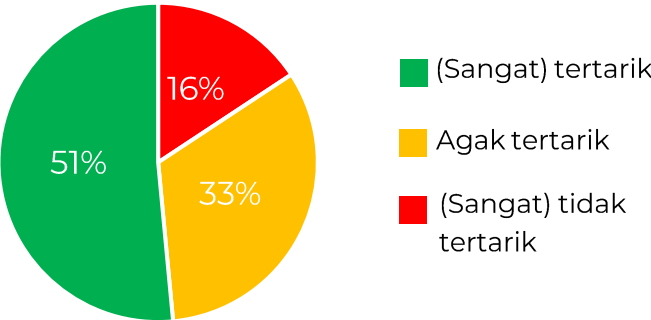
Keyakinan terhadap pemerintah

base: cenderung terdistribusi, n=134



Ketertarikan terlibat dalam isu demokrasi

base: cenderung terdistribusi, n=134



Ketertarikan terhadap isu

base: cenderung terdistribusi, n=69

Alasan ingin terlibat	
Merasa punya tanggung jawab	44%
Merasa isu tersebut penting	39%
Sering melihat isu di media sosial	33%
Ingin membantu kelompok rentan	24%
Berkaitan dengan yang dipelajari	17%

Ketidaktertarikan terhadap isu

base: cenderung terdistribusi, n=65

Alasan belum ingin terlibat	
Tidak tahu mulai dari mana	25%
Takut dianggap sok tahu	25%
Merasa kurang kemampuan	24%
Tidak punya waktu	19%
Takut berbeda pendapat	18%

Demografi & profil Moderat

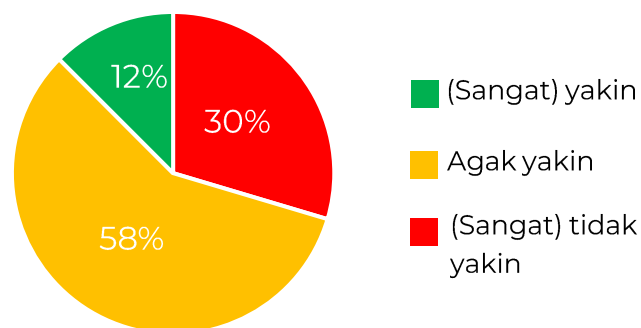


Penilaian terhadap kinerja pemerintah pusat

4.5

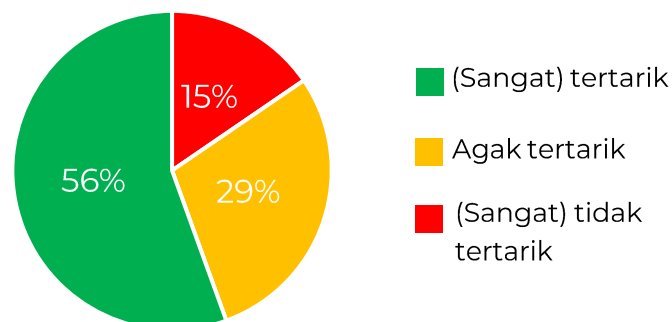
Keyakinan terhadap pemerintah

base: moderat, n=85



Ketertarikan terlibat dalam isu demokrasi

base: moderat, n=85



Ketertarikan terhadap isu

base: moderat n=47

Alasan ingin terlibat	
Merasa isu tersebut penting	43%
Merasa punya tanggung jawab	35%
Melihat isu di media sosial	33%
Pernah mendengar/mengalami	32%
Ingin membantu kelompok rentan	30%

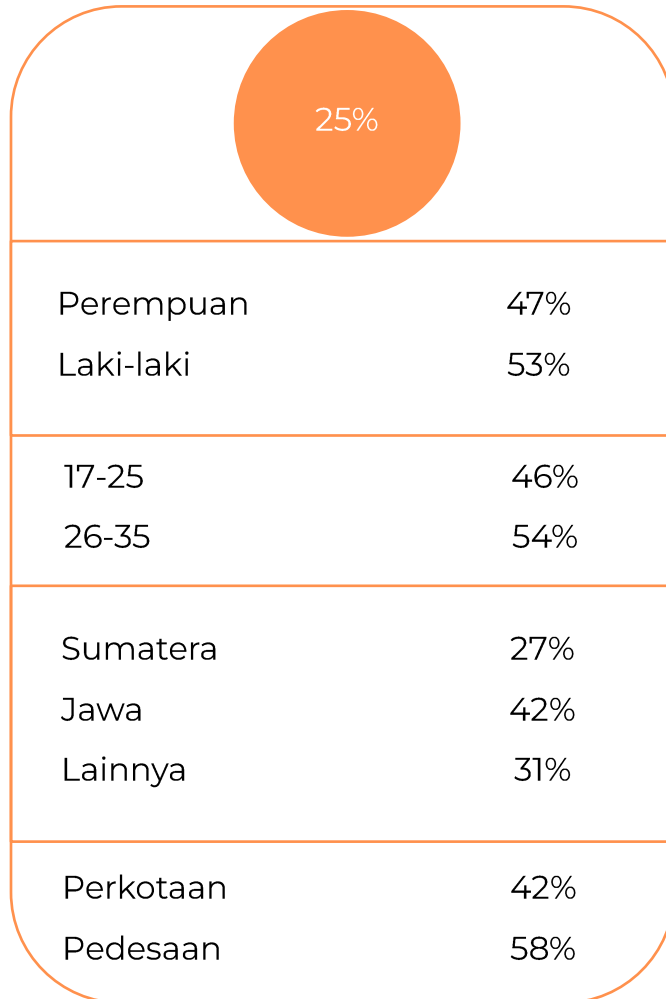
Ketidaktertarikan terhadap isu

base: moderat, n=38

Alasan belum ingin terlibat	
Merasa kurang kemampuan	33%
Kurang informasi	23%
Takut dianggap sok tahu	22%
Tidak tahu mulai dari mana	21%
Tidak punya waktu	19%

Cenderung terpusat

Demografi & profil cenderung terpusat

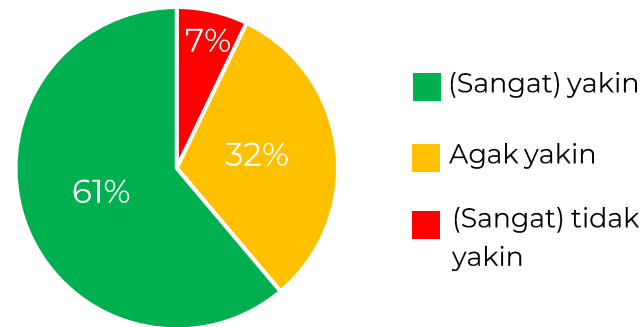


Penilaian terhadap kinerja pemerintah pusat

6.3

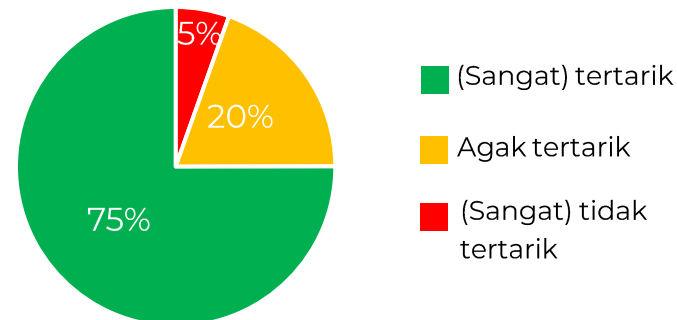
Keyakinan terhadap pemerintah

base: cenderung terpusat, n=104



Ketertarikan terlibat dalam isu demokrasi

base: cenderung terpusat, n=104



Ketertarikan terhadap isu

base: cenderung terpusat, n=78

Alasan ingin terlibat

Merasa punya tanggung jawab	44%
Merasa isu tersebut penting	37%
Melihat isu di media sosial	32%
Pernah mengalami/mendengar	25%
Ingin membantu kelompok rentan	22%

Ketidaktertarikan terhadap isu

base: cenderung terpusat, n=26

Alasan belum ingin terlibat

Topik sulit dipahami	27%
Merasa kurang kemampuan	22%
Kurang informasi	21%
Takut berbeda pendapat	19%
Perlu sertifikasi khusus	18%

Sangat terpusat

Demografi & profil Sangat terpusat

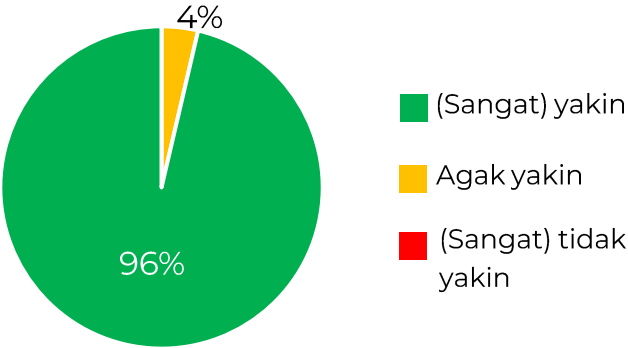
3%	
Perempuan	69%
Laki-laki	31%
17-25	4%
26-35	96%
Sumatera	30%
Jawa	40%
Lainnya	30%
Perkotaan	41%
Pedesaan	59%

Penilaian terhadap kinerja pemerintah pusat

8.3

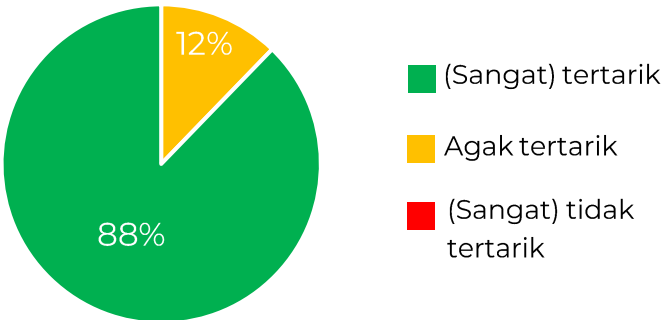
Keyakinan terhadap pemerintah

base: sangat terpusat, n=14



Ketertarikan terlibat dalam isu demokrasi

base: sangat terpusat, n=14



Ketertarikan terhadap isu

base: sangat terpusat, n=12

Alasan ingin terlibat	
Merasa isu tersebut penting	53%
Ingin membantu kelompok rentan	47%
Mengalami/mendengar isu	30%
Ingin belajar hal baru	23%
Diajak teman/keluarga	21%

Ketidaktertarikan terhadap isu

base: sangat terpusat, n=2

Alasan belum ingin terlibat	
Takut berbeda pendapat	50%
Kurang informasi	50%
Dirasa kurang penting	50%
Merasa kurang kemampuan	50%



② Isu Prioritas

Pengantar

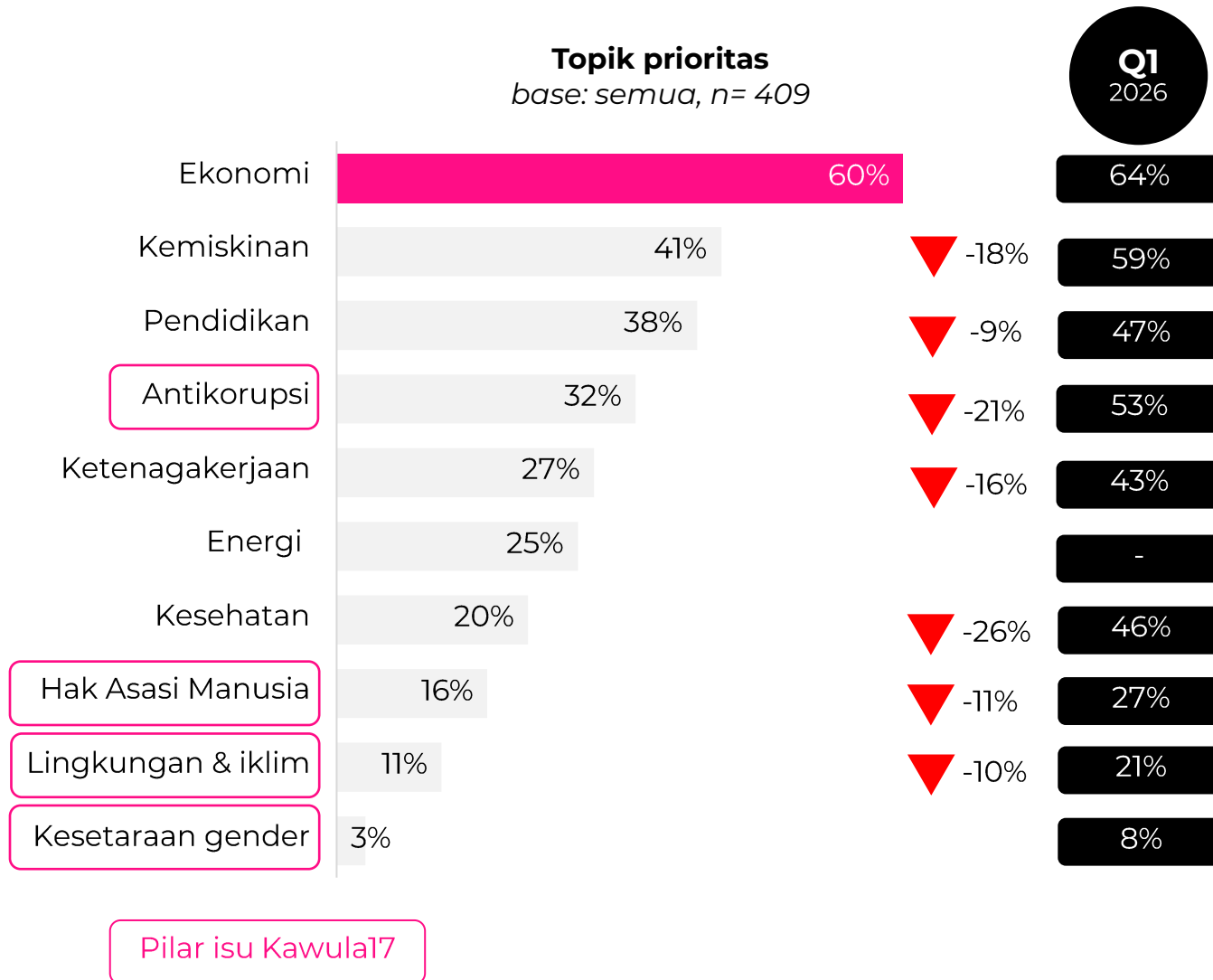
Sejak April hingga Juni 2026, terdapat berbagai kebijakan dan perkembangan politik yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam bidang ekonomi yang saat ini menjadi perbincangan, masyarakat dihadapkan pada sejumlah kebijakan yang berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamina, penerapan pajak kendaraan listrik, serta perluasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

Di bidang pendidikan, pemerintah menjalankan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, kedua program tersebut masih mendapat berbagai tanggapan terkait efektivitas pelaksanaannya dan manfaatnya terhadap kualitas pendidikan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa tata kelola program pemerintah masih menjadi perhatian masyarakat.

Dalam bidang keamanan, pemerintah baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Revisi ini mengubah sejumlah ketentuan terkait aturan kekuasaan kepolisian dan pengawasannya. Pengesahan UU Polri yang baru tersebut memunculkan perdebatan di tengah masyarakat sipil mengenai urgensi, efektivitas, serta dampaknya terhadap hak-hak dan kebebasan sipil warga, serta pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan.

Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa orang muda kini hidup di tengah dinamika politik dan kebijakan yang kian tak menentu. Kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya berdampak pada bidang tertentu, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, hingga lingkungan masyarakat, terutama generasi muda, secara lebih luas.

Perhatian orang muda tetap terpusat pada isu ekonomi sejak awal 2026.



Topik kemiskinan menjadi prioritas secara signifikan bagi mereka yang memiliki pendidikan SMP/SMA sederajat (43%).

Topik lingkungan & iklim menjadi prioritas secara signifikan bagi mereka yang cenderung terpusat (18%).

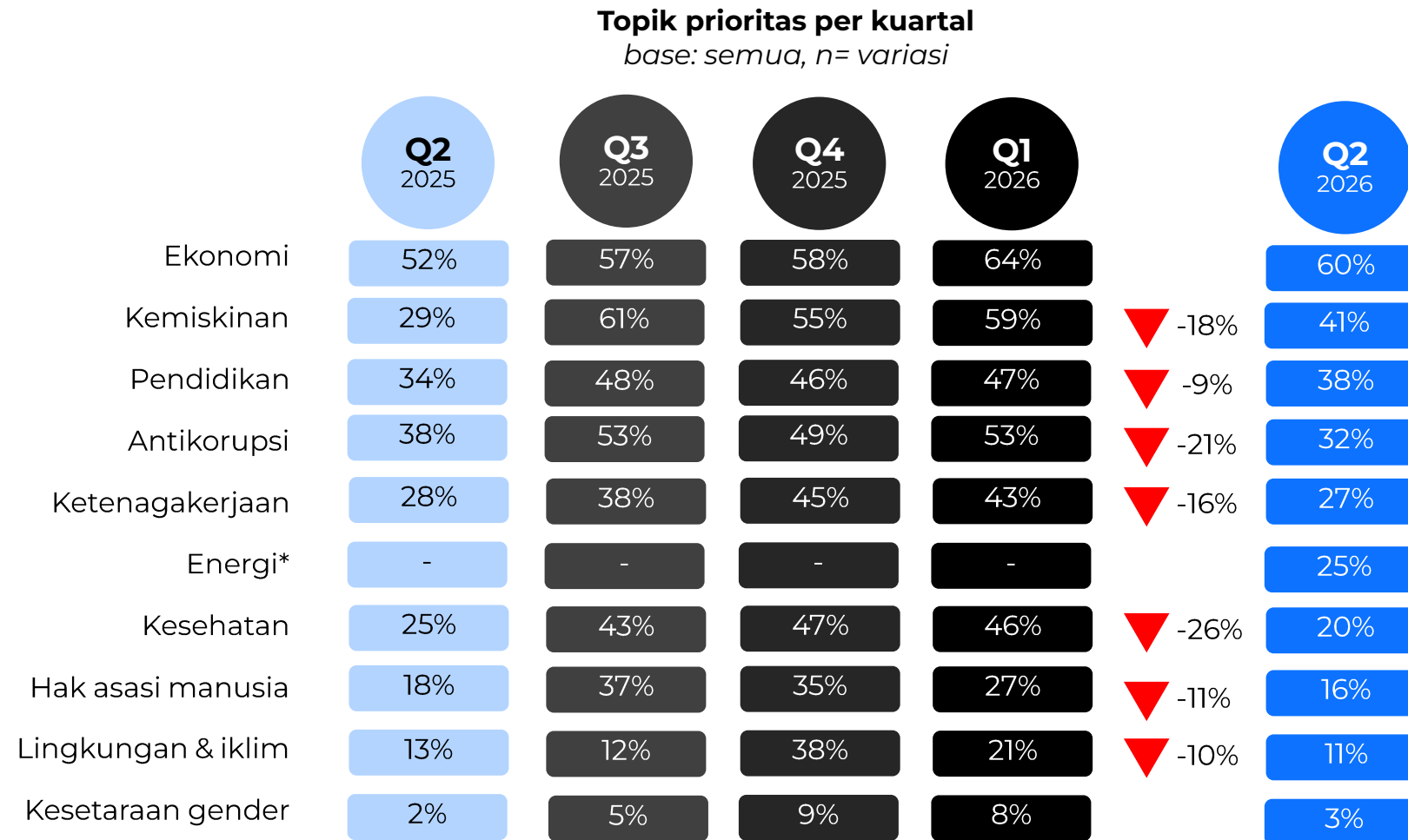
Topik pendidikan menjadi prioritas secara signifikan bagi mereka dengan nilai SES A (58%) dan mereka yang sangat terdistribusi (54%).

Topik energi menjadi prioritas secara signifikan bagi mereka yang cenderung terpusat (37%).

Nice to know

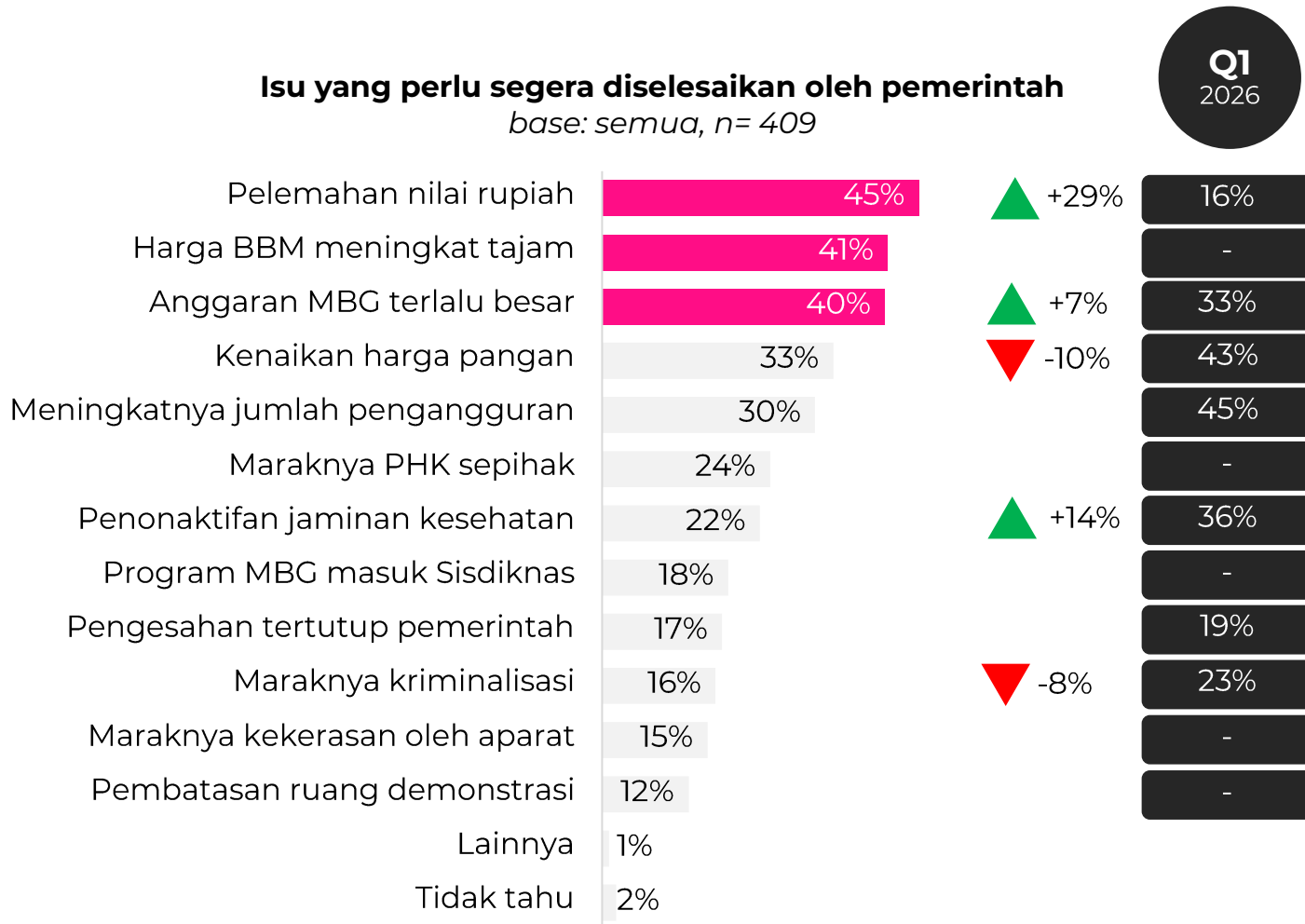
Survei Konsumen Bank Indonesia (Mei 2026) menunjukkan **Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)** berada di angka **120,9**, **turun dari 123 pada April 2026**. Meski masih berada pada level optimistis (IKK >100), penurunan ini menunjukkan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi sedikit melemah dibanding bulan sebelumnya

Fokus orang muda semakin terkonsentrasi pada isu ekonomi, sementara kekhawatiran terhadap isu-isu lainnya cenderung menurun.



*Topik Energi baru menjadi pertanyaan pada Q2 2026

Sejalan dengan prioritas topik, isu-isu ekonomi tetap dominan dan dianggap sebagai isu yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah.



Meningkatnya jumlah pengangguran dianggap penting secara signifikan bagi mereka dengan nilai SES B (36%)

Isu penonaktifan BPJS Kesehatan menjadi isu yang paling penting bagi masyarakat pedesaan (26%)

Program MBG masuk Sisdiknas dianggap penting secara signifikan bagi mereka yang cenderung terpusat (25%).

Pelanggaran demonstrasi dinilai penting secara signifikan bagi mereka yang berusia 26-35 tahun (16%) dan mereka yang (sangat) tertarik (16%) pada isu demokrasi politik

Nice to know

Badan Pusat Statistik (2026) mencatat inflasi tahunan Indonesia pada **Mei 2026 mencapai 3,08%**, lebih tinggi dibanding **2,42% pada April 2026**. Kenaikan harga terutama dipengaruhi oleh komponen pangan, harga yang diatur pemerintah, dan inflasi inti.

Terkait isu lingkungan, kerusakan akibat tambang, perampasan hutan adat, dan peluasan sawit di Papua paling diperhatikan pada Q2 2026.

Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan base: semua, n=409

Q1
2026



Isu sampah dianggap penting secara signifikan bagi mereka yang memiliki Pendidikan SMP/SMA sederajat (27%)

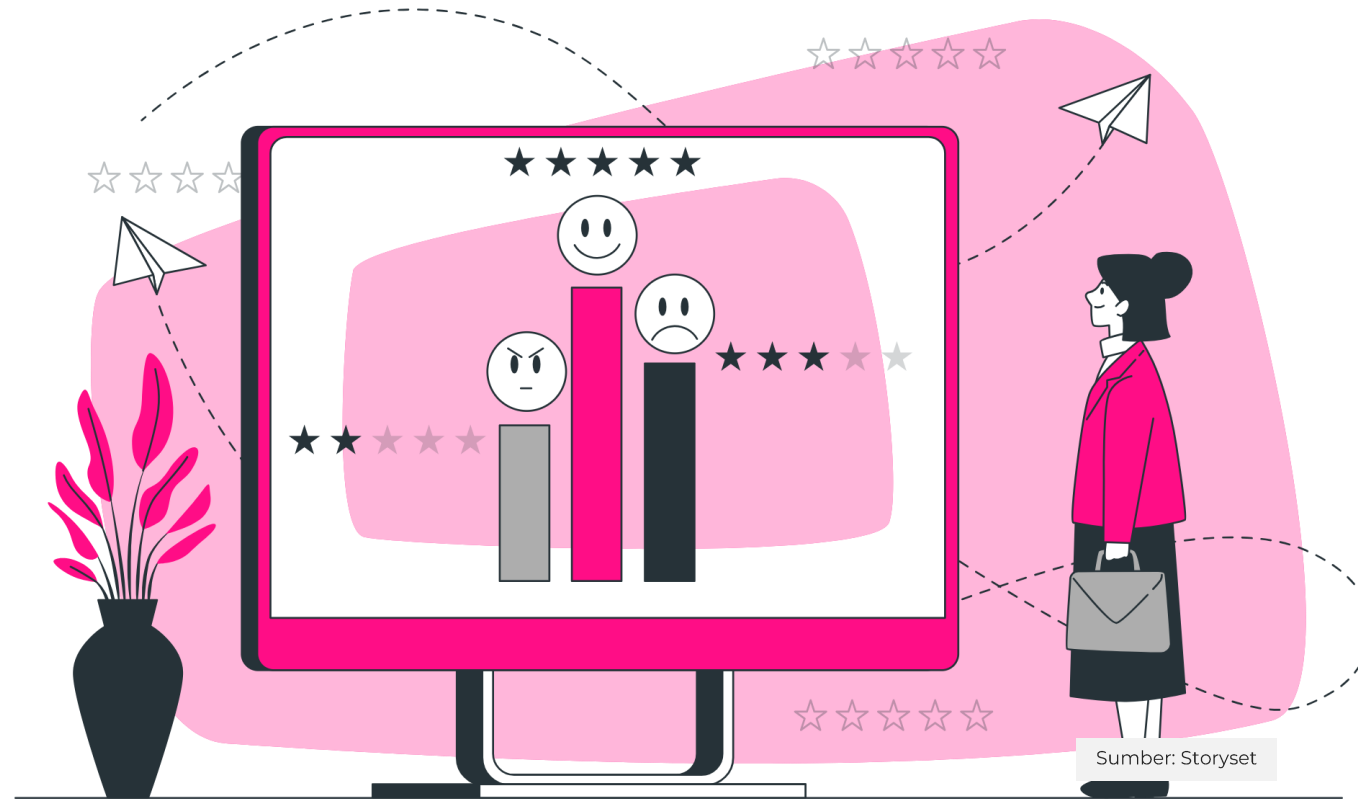
Matinya terumbu karang menjadi isu prioritas secara signifikan bagi mereka yang di luar pulau Jawa dan Sumatera (21%)

Isu hak masyarakat adat secara signifikan dipilih bagi mereka dengan nilai SES B (23%)

Perampasan hutan adat dinilai penting secara signifikan bagi mereka yang cenderung terdistribusi (43%).

Nice to know

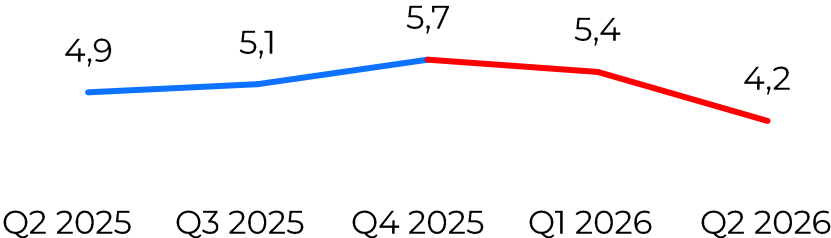
Kementerian Kehutanan (2025) mencatat angka deforestasi netto Indonesia **pada 2024 mencapai 175.438 hektare**. Data ini menunjukkan bahwa deforestasi masih menjadi tantangan, sehingga isu seperti kerusakan akibat tambang, perampasan hutan adat, dan ekspansi sawit tetap menjadi perhatian masyarakat.



3 Penilaian Kinerja Pemerintah

Penilaian kinerja pemerintah pada Q2 2026 mencapai titik terendah, yakni 4,2 poin (skala 1-10). Tren penurunan ini konsisten sejak akhir 2025.

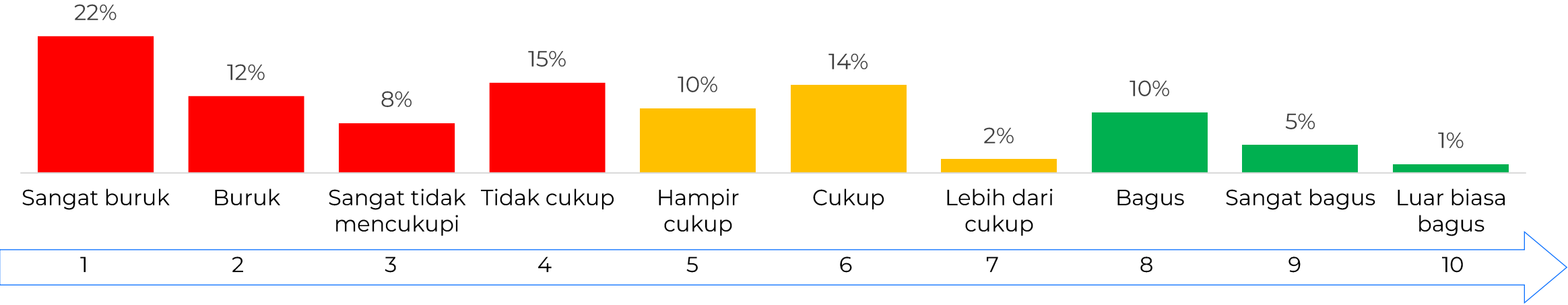
Tren kinerja pemerintah
base: semua, n= variasi



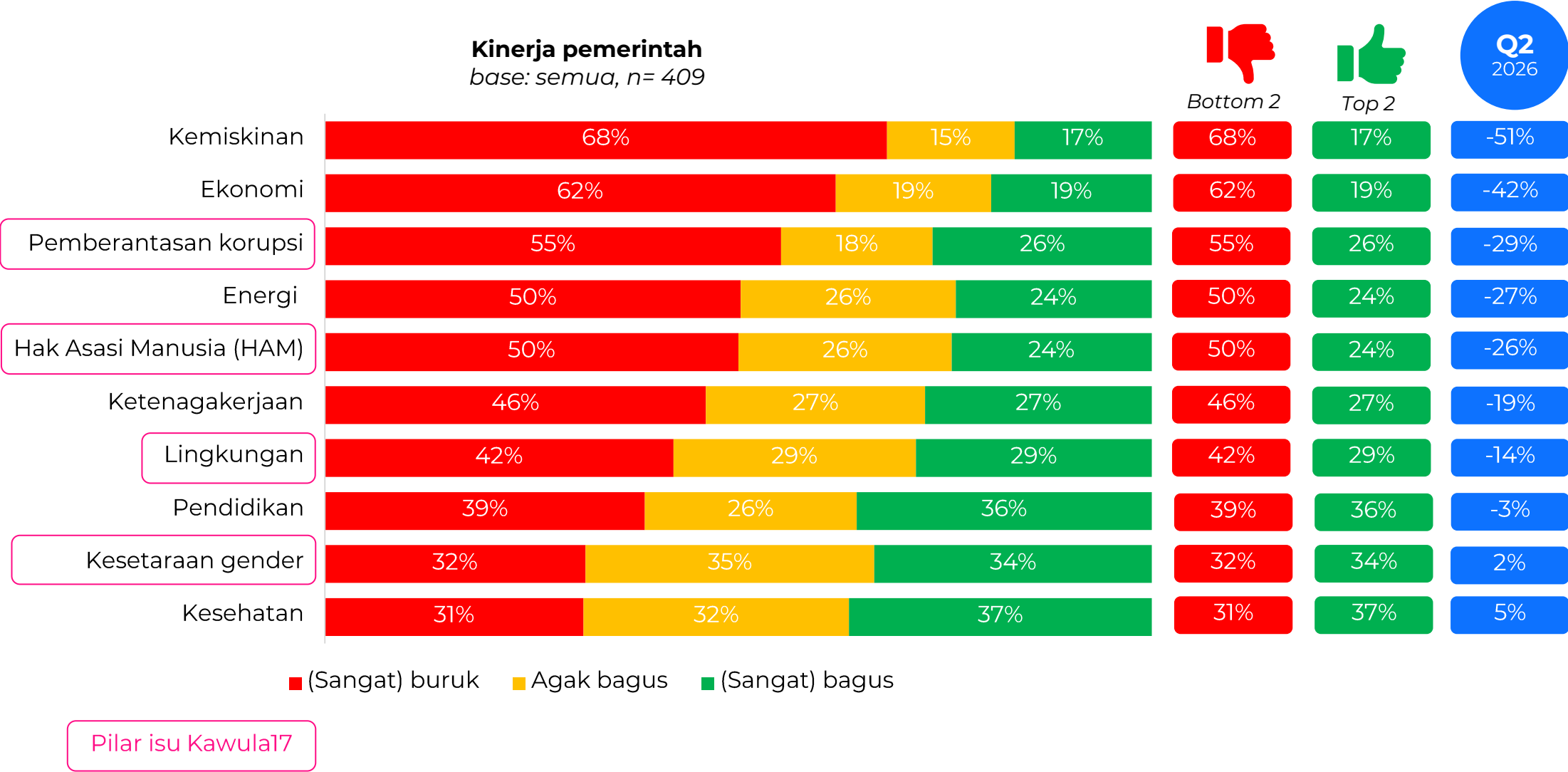
Nice to know

Chandler Good Government Index 2026 menempatkan Indonesia di **peringkat 48 dari 133 negara**. Aspek yang masih menjadi tantangan antara lain **kualitas birokrasi (47), implementasi kebijakan (37), dan transparansi (38)**. Indikator-indikator tersebut merupakan bagian dari penilaian terhadap efektivitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Kinerja Pemerintah
base: semua, n= 409



Secara umum, kinerja pemerintah pada hampir seluruh topik dinilai (sangat) buruk, terutama terkait kemiskinan dan ekonomi.



Skor bersih (NET Score) kinerja pemerintah menurun drastis pada semua isu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (Q1 2026).

	NET score					
	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026		Q2 2026
Kemiskinan	-	-57%	-24%	-33%	▼ -18%	-51%
Ekonomi	-39%	-32%	-2%	-14%	▼ -28%	-42%
Pemberantasan Korupsi	-22%	-15%	3%	-4%	▼ -25%	-29%
Hak Asasi Manusia (HAM)	-12%	-22%	8%	-4%	▼ -22%	-26%
Ketenagakerjaan	-	-24%	-2%	-1%	▼ -18%	-19%
Lingkungan	-6%	3%	8%	9%	▼ -23%	-14%
Pendidikan	1%	5%	32%	20%	▼ -23%	-3%
Kesetaraan gender	10%	13%	36%	31%	▼ -29%	2%
Kesehatan	5%	7%	36%	18%	▼ -13%	5%
Energi*	-	-	-	-		-27%

JP02 Bagaimana kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan program hasil terbaik cepatnya?

*Topik Energi baru menjadi pertanyaan pada Q2 2026

Program *Quick Win* Pemerintah

Pemerintah menetapkan sejumlah program hasil terbaik cepat (*quick win*) di dalam dokumen visi misinya. Program-program tersebut adalah:

Makan Bergizi Gratis

Program ini merupakan inisiatif untuk menyediakan asupan gizi yang cukup dan seimbang bagi anak-anak Indonesia, khususnya di sekolah dan pesantren, yang bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif dan deteksi dini penyakit. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan ketika ulang tahun, serta untuk anak sekolah dan ibu hamil

Food Estate

Program *food estate* adalah pengembangan kawasan pertanian skala besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan tujuan utama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sekolah Unggulan Garuda

Program ini merupakan inisiatif untuk mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah berkualitas tinggi di berbagai daerah, yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan pencetakan lulusan berdaya saing global.

Kartu Kesejahteraan Sosial

Program ini dirancang untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kartu ini akan mengintegrasikan berbagai jenis bantuan sosial pemerintah, seperti bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga penyalurannya lebih efisien, transparan, dan mampu menjangkau keluarga prasejahtera secara langsung.

Menaikkan Gaji ASN

Kebijakan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, yang diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

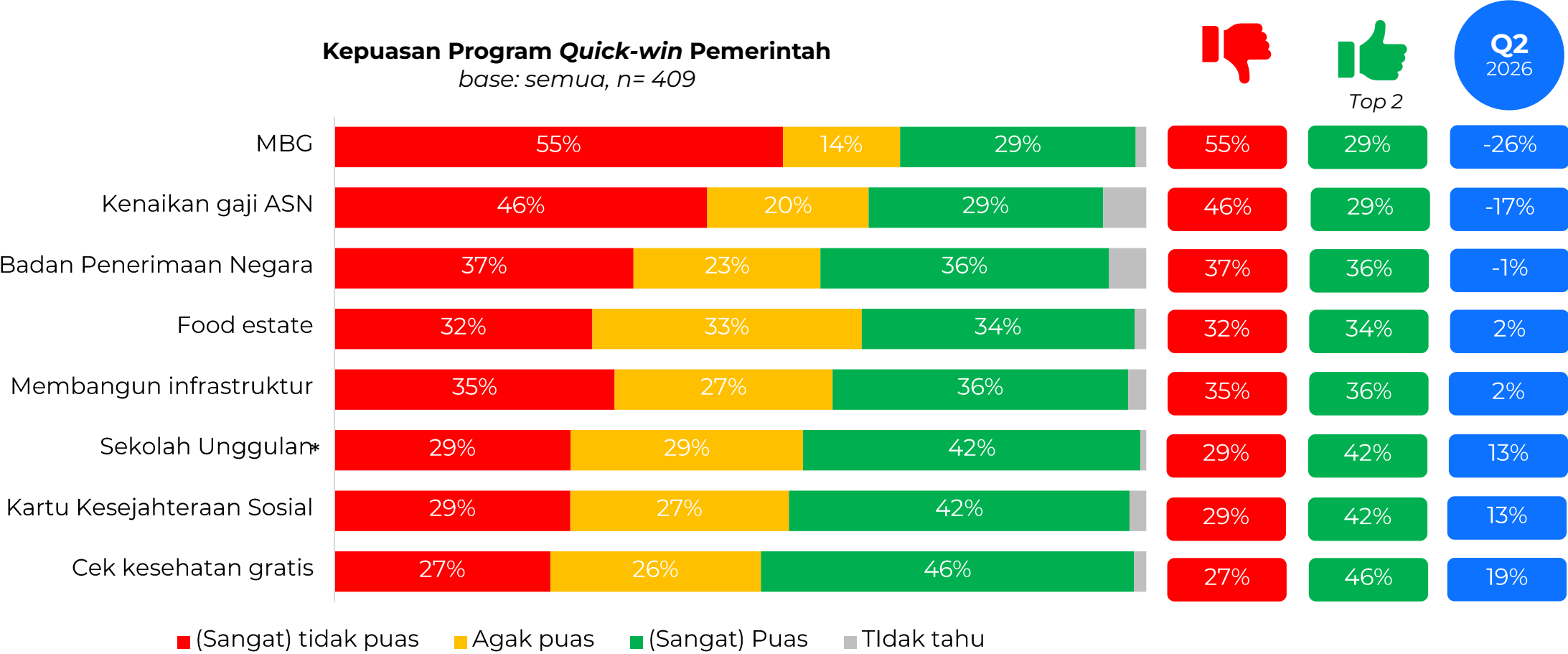
Membangun Infrastruktur

Program membangun infrastruktur akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana dasar yang esensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, infrastruktur energi dan digital.

Badan Penerimaan Negara

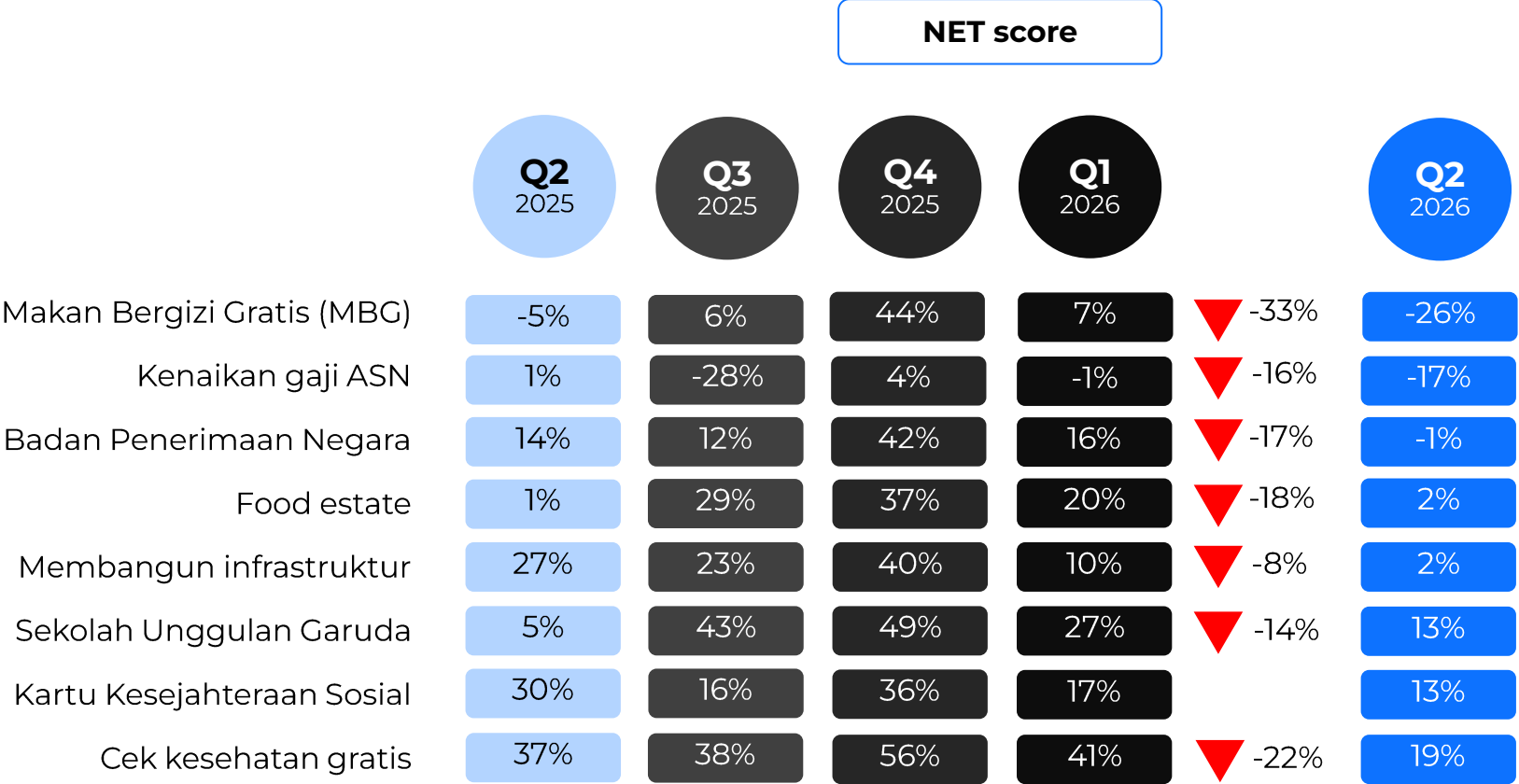
Pembentukan Badan Penerimaan Negara adalah langkah restrukturisasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor, termasuk pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Meski menjadi program prioritas pemerintah, orang muda merasa paling tidak puas dengan program Makan Bergizi Gratis (55%).



*Persebaran daerah Sekolah Unggulan Garuda terlampir pada bagian lampiran
JP02 Bagaimana kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan program hasil terbaik cepatnya?

Sejak mencapai puncaknya pada Q4 2025, kepuasan terhadap hampir seluruh program *quick-win* terus menurun hingga kuartal ini.



Program Terkini Pemerintah (1)

Berikut beberapa program, kebijakan, dan janji pemerintahan Prabowo-Gibran yang terekam dalam NKS Q2 2026:

Perluasan PSN di Papua

Pemerintah memperluas daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Badan Eskpor SDA melalui Danantara

Pemerintah membentuk badan pengelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui Danantara untuk memperkuat tata kelola komoditas strategis, meningkatkan nilai tambah, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Pemajakan kendaraan listrik

Pemerintah mulai menerapkan kebijakan perpajakan terhadap kendaraan listrik sebagai bagian dari penyesuaian regulasi fiskal sekaligus menjaga keseimbangan antara insentif transisi energi dan penerimaan negara.

Kenaikan harga BBM

Penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Pertamax 92 dilakukan sebagai respons terhadap perubahan harga minyak dunia, nilai tukar, dan kebijakan badan usaha dalam menjaga harga energi.

Program Sekolah Rakyat

Pemerintah menjalankan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih inklusif.

Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih merupakan upaya untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan koperasi yang berperan dalam distribusi kebutuhan pokok, layanan usaha, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Kunjungan aktif ke luar negeri

Pemerintah meningkatkan aktivitas diplomasi luar negeri melalui berbagai kunjungan internasional untuk memperkuat kerja sama bilateral, menarik investasi, dan memperluas peran Indonesia dalam isu global.

Penciptaan 19 juta lapangan kerja

Pemerintah menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam 5 tahun untuk menjaga angka pengangguran agar tidak bertambah seiring dengan pertambahan rata-rata angkatan kerja baru.

Program Terkini Pemerintah (2)

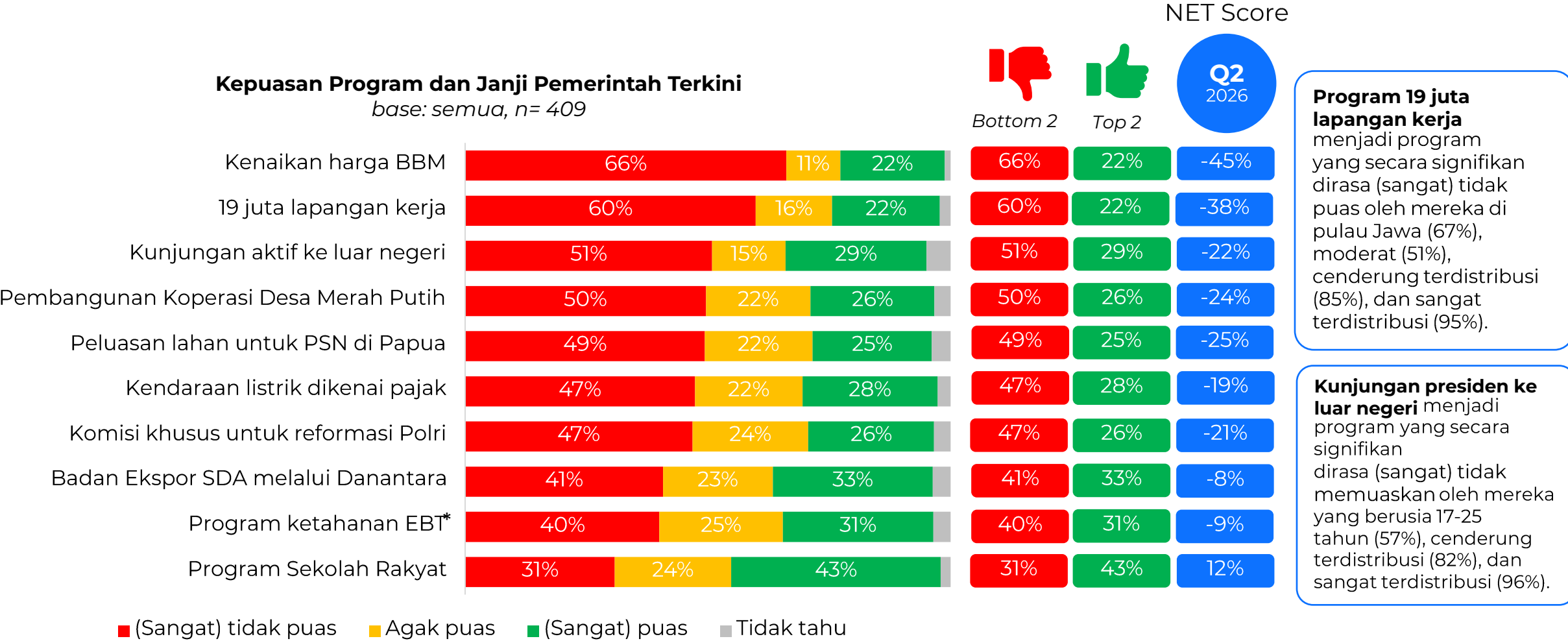
Ketahanan energi baru terbarukan

Ketahanan energi menjadi agenda prioritas pada 2026. Pemerintah juga memberikan dukungan fiskal yang diarahkan untuk peningkatan lifting migas, stabilisasi harga, dan pengembangan sektor energi baru dan terbarukan.

Komisi percepatan reformasi Polri

Komisi ini bertugas mempercepat proses reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, dan memperbaiki tata kelola di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya komisi ini, pemerintah ingin memastikan Polri menjadi institusi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.

Ketidakpuasan orang muda terhadap kenaikan harga BBM tercermin dari skor kepuasan bersih (NET score) yang mencapai -45%.

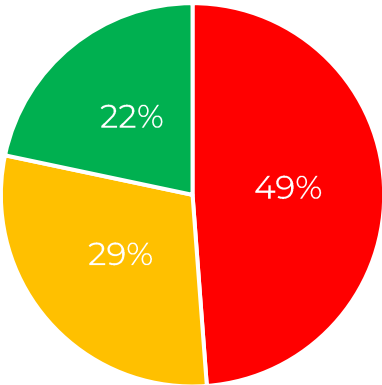




④ Ekspektasi terhadap Pemerintah

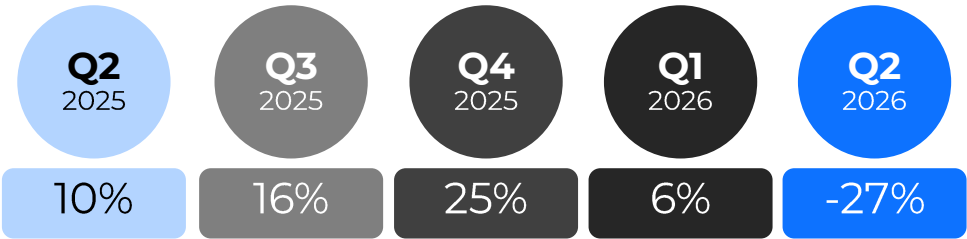
Keyakinan orang muda terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memenuhi programnya mencapai titik terendah dalam setahun terakhir.

Keyakinan terhadap pemerintah
base: semua, n= 409



■ (Sangat) tidak yakin ■ Agak yakin ■ (Sangat) yakin

NET score



35% orang muda dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, cenderung terdistribusi (75%), sangat terdistribusi (92%) merasa **(sangat) tidak yakin** terhadap pemerintah.

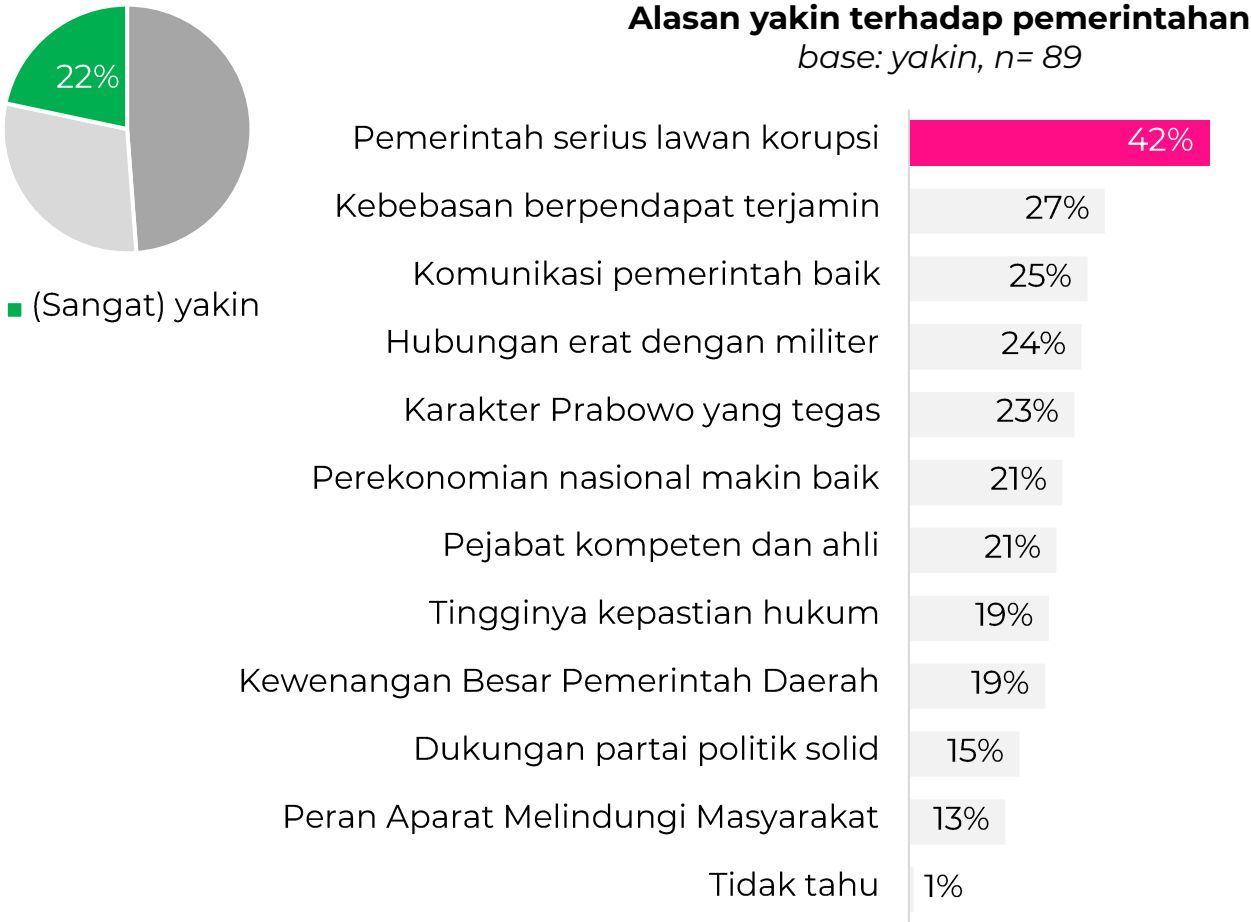
Orang muda yang **(sangat) yakin** terhadap pemerintah secara signifikan adalah mereka yang cenderung terpusat (61%).

Nice to know

Organisation for Economic CO-operation and Development **(OECD)** mencatat bahwa **keyakinan dan kepercayaan masyarakat** terhadap pemerintah **sebagai pilar dari demokrasi** yang mampu mendorong diskursus dan partisipasi, ketegakan hukum, dan memfasilitasi reformasi.

Orang muda yang **agak yakin** terhadap pemerintah secara signifikan adalah mereka yang termasuk dalam spektrum politik moderat (58%).

Keseriusan pemerintah dalam melawan korupsi menjadi alasan utama bagi mereka yang tetap yakin pada pemerintah.



Kewenangan besar pemerintah daerah secara signifikan dipilih oleh mereka yang berusia 26-35 tahun (28%).

Perekonomian nasional makin baik menjadi alasan utama yakin terhadap pemerintah bagi mereka yang memiliki nilai SES A (62%).

Nice to know

OECD Survey mengenai "**Drivers of Trust in Public Institutions 2026**" menyebut bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi oleh **persepsi atas keandalan, responsivitas, integritas, keterbukaan, dan keadilan** pemerintah yang membentuk keyakinan masyarakat bahwa pemerintah mampu menjalankan kebijakan dan memenuhi janjinya.

Di sisi lain, maraknya kasus korupsi pejabat juga menjadi faktor yang melemahkan keyakinan orang muda pada pemerintah.



Pejabat yang tidak kompeten dipilih menjadi alasan utama ketidakyakinan terhadap pemerintah secara signifikan oleh mereka dengan nilai SES A (50%).

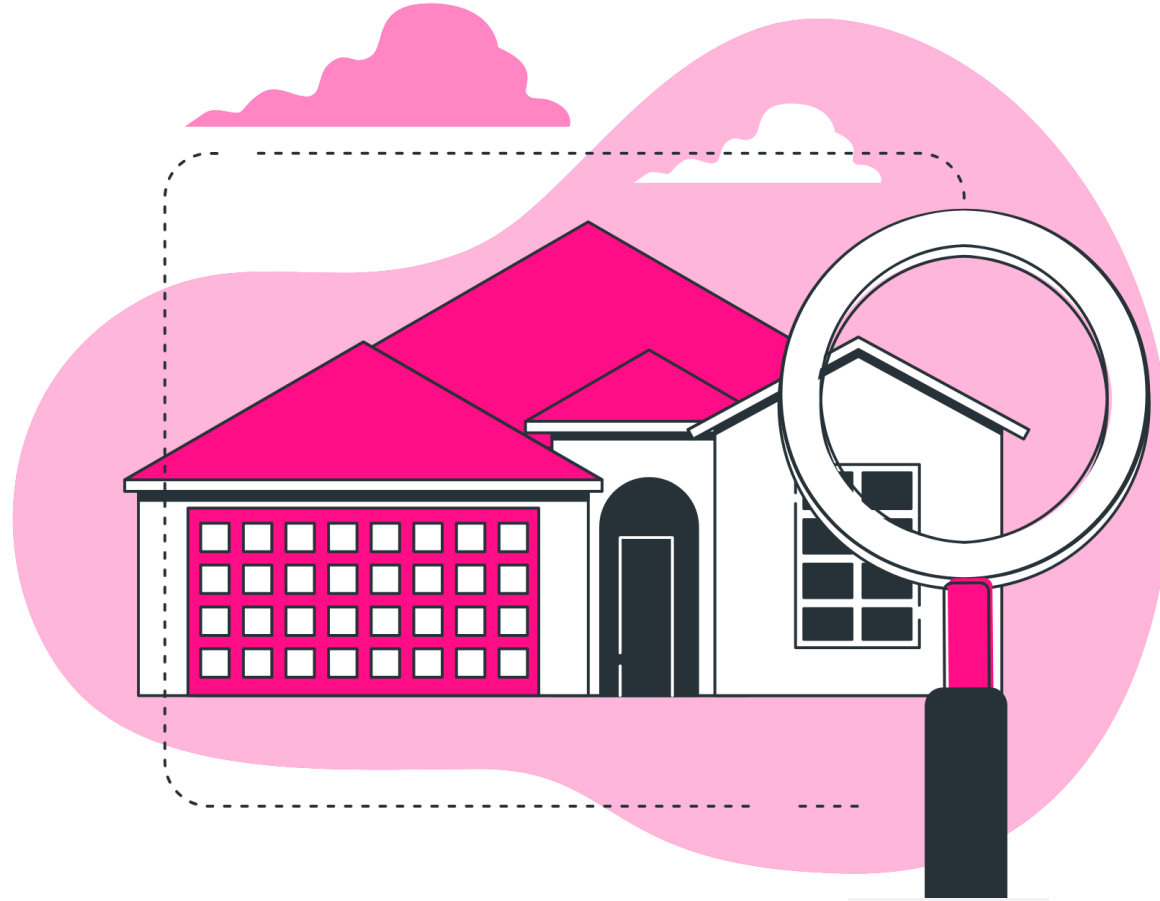
Hubungan erat dengan militer menjadi pilihan utama secara signifikan bagi mereka yang sangat terdistribusi (23%), dan perguruan tinggi (22%).

Karakter Prabowo yang emosional dinilai sebagai alasan ketidakyakinan terhadap pemerintah secara signifikan oleh mereka yang sangat terdistribusi (20%), dan perguruan tinggi (24%).

Kebebasan berpendapat dibatasi dipilih oleh mereka dengan kelompok SES C (37%).

Nice to know

Transparency International (2025) menyatakan bahwa korupsi **melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik**, menghambat pembangunan, dan memperburuk kualitas demokrasi. Oleh karena itu, tingginya persepsi korupsi sering kali **diikuti dengan menurunnya kepercayaan** terhadap pemerintah.

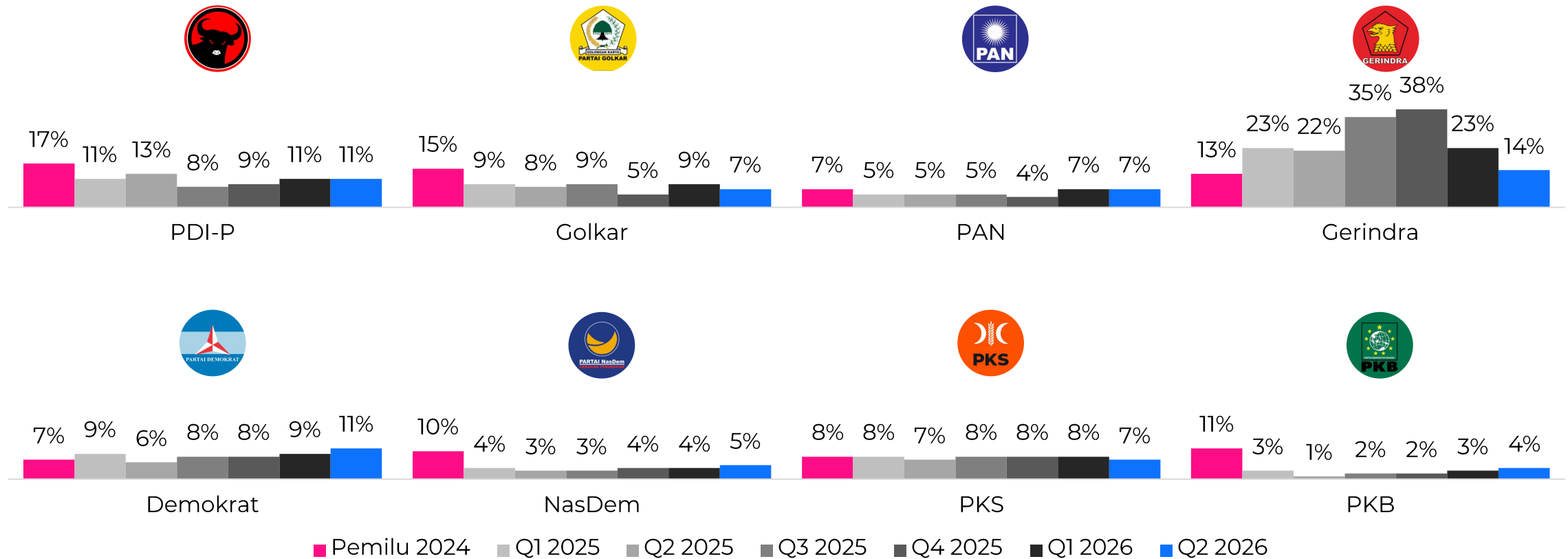


Sumber: Storyset

5 *Monitoring* Partai Politik

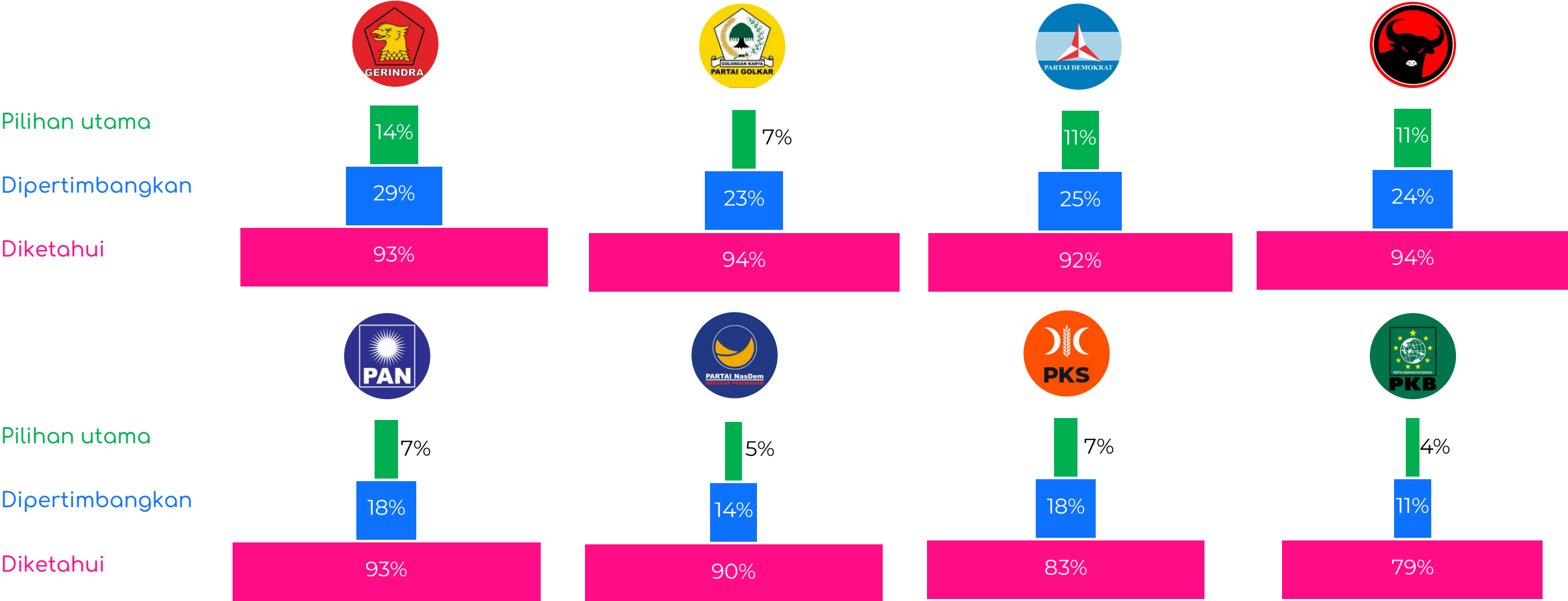
Meski masih mendapatkan preferensi tertinggi, tren suara Gerindra menurun drastis.

Preferensi partai di parlemen
base: semua, n= variasi



Gerindra (14%), Demokrat (11%), dan PDIP (11%) menjadi tiga partai di parlemen dengan preferensi suara tertinggi di kuartal ini.

Funnel partai politik di parlemen*
base: semua, n= variasi



Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?

Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?

Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

* Cara membaca funnel partai politik terlampir di lampiran

Terlihat penurunan suara yang konsisten terhadap Partai Gerindra sejak Q4 2025.

Perbandingan preferensi partai politik di parlemen
base: semua, n= variasi

Partai Politik	Diketahui					Dipertimbangkan					Pilihan Utama				
	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026
Gerindra	95%	96%	93%	92%	93%	42%	56%	56%	42%	30%	22%	35%	38%	23%	14%
Golkar	93%	92%	91%	90%	92%	23%	31%	26%	28%	23%	8%	9%	5%	9%	11%
Demokrat	90%	92%	92%	91%	92%	20%	29%	30%	32%	21%	6%	8%	8%	9%	7%
PDIP	88%	96%	93%	93%	94%	21%	21%	24%	24%	18%	13%	8%	9%	11%	7%
PAN	86%	93%	93%	93%	93%	17%	23%	20%	24%	23%	5%	5%	4%	7%	11%
NasDem	84%	91%	89%	88%	90%	11%	15%	15%	17%	10%	3%	3%	4%	4%	4%
PKS	81%	84%	86%	83%	83%	16%	8%	21%	21%	23%	7%	8%	8%	8%	11%
PKB	78%	77%	79%	79%	79%	5%	2%	10%	10%	14%	1%	2%	2%	3%	5%

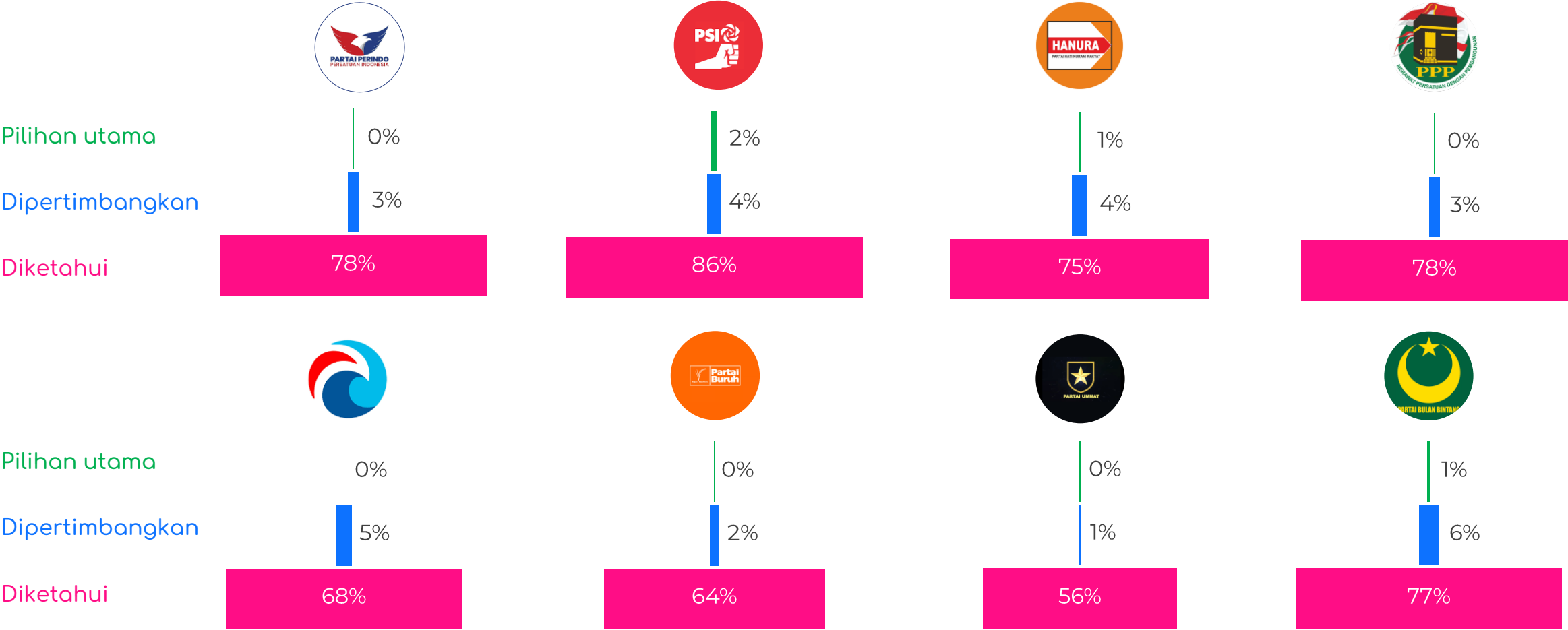
Naik signifikan dari kuartal sebelumnya

Turun signifikan dari kuartal sebelumnya

Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?
Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?
Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

Dengan ambang batas parlemen 4%, belum ada partai nonparlemen yang pada kuartal ini mampu lolos ke Senayan.

Funnel partai politik non-parlemen*
base: semua, n= variasi

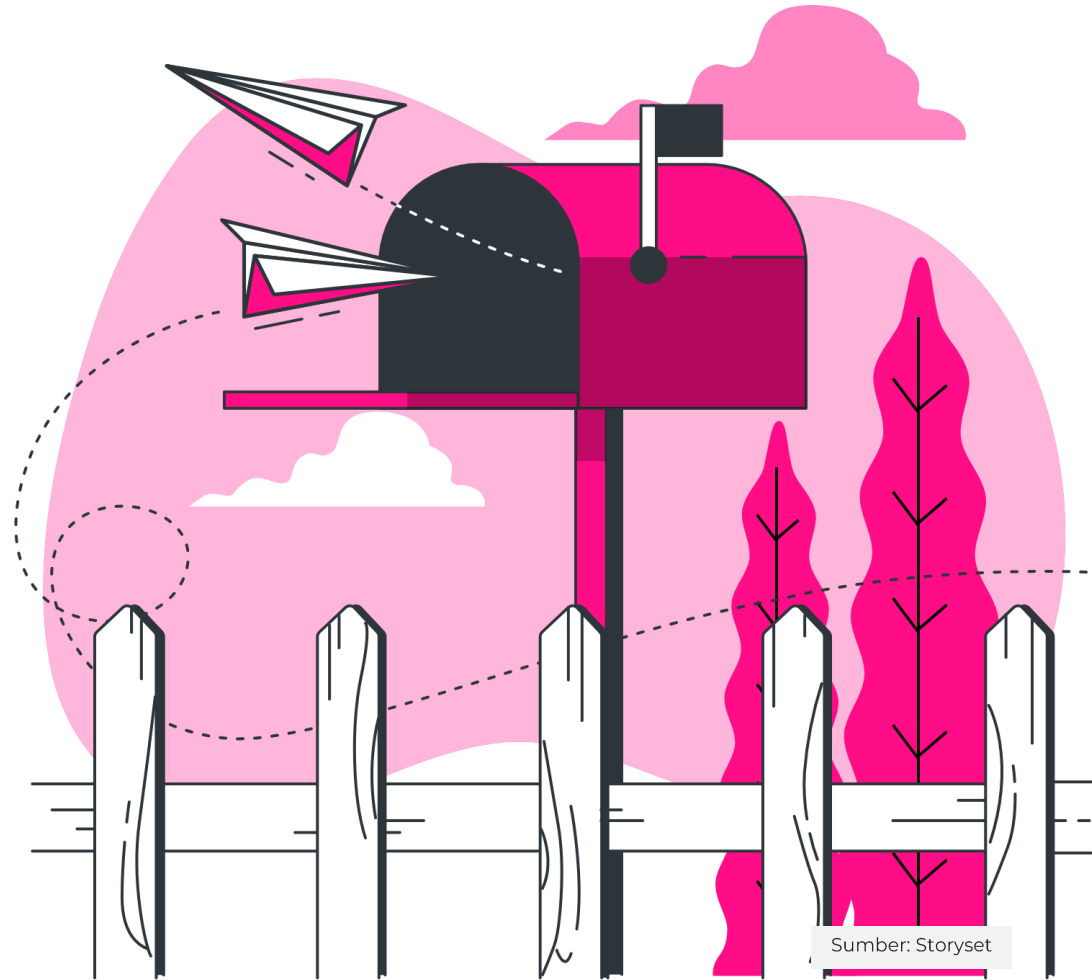


Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?

Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?

Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

* Cara membaca funnel partai politik terlampir di lampiran



⑥ Opini Masyarakat dalam RUU Berjalan

Program Legislasi Nasional

Setiap undang-undang (UU) yang akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Proses pembentukan tersebut dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan.

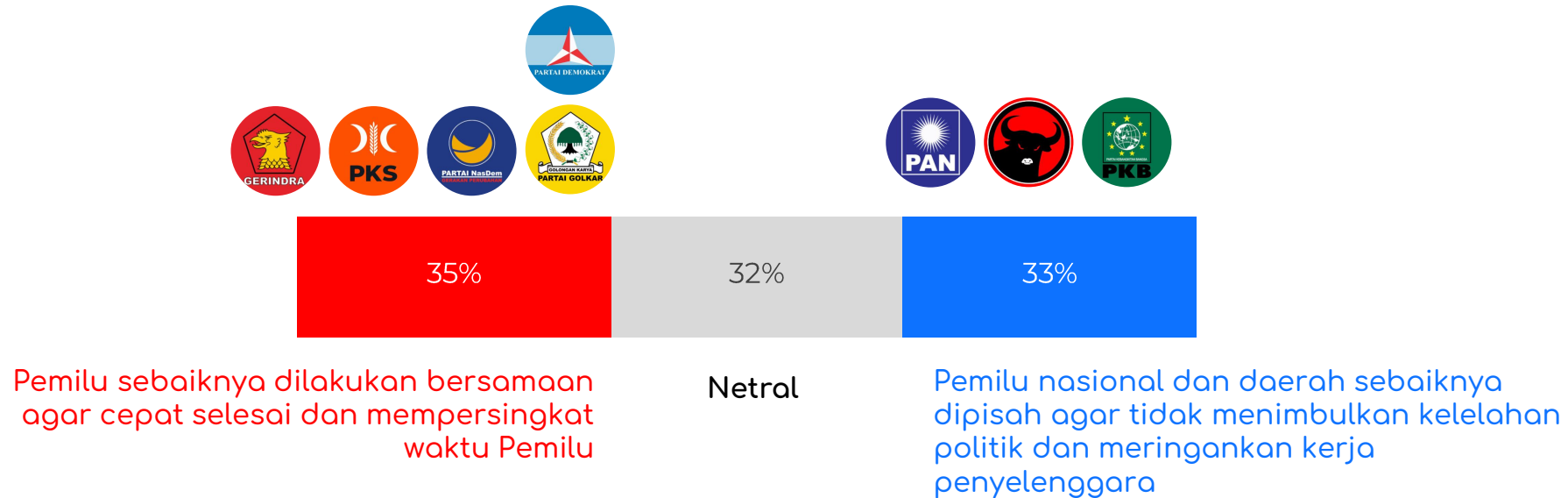
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan daftar rencana pembentukan UU yang disusun berdasarkan program pembangunan nasional. Prolegnas menjadi acuan untuk menyusun daftar UU yang akan dibahas dalam 1 atau 5 tahun ke depan. Setiap proses pembahasan RUU dalam Prolegnas perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, sebagaimana diatur dalam UU P3. Oleh karena itu, ruang partisipasi yang inklusif menjadi prasyarat penting untuk menjaga legitimasi dan kualitas dalam proses pembentukan UU.

Namun, dalam praktiknya, proses legislasi sering kali berlangsung (terlalu) cepat, minim transparansi, dan belum memberikan ruang partisipasi publik yang bermakna. Padahal, setiap UU yang disahkan akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk pada orang muda.

Berangkat dari kondisi tersebut, Kawula17 melakukan pemetaan terhadap persepsi orang muda mengenai berbagai RUU yang sedang dibahas dalam Prolegnas. Inisiatif ini bertujuan untuk memahami tingkat pengetahuan, sikap, serta preferensi orang muda terhadap substansi maupun proses pembentukan berbagai RUU. Selain itu, pemetaan ini diharapkan mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas para pembuat kebijakan.

Temuan-temuan dalam bagian Prolegnas ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana orang muda memandang agenda legislasi nasional sekaligus menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan proses legislasi yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif.

Meski persiapan Pemilu 2029 akan dimulai, partai di parlemen belum memperlihatkan posisi dan langkah nyata dalam proses pembahasan RUU Pemilu.



RUU Pemilu bertujuan memperbarui aturan pemilu yang menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan ke depan, termasuk pemisahan jadwal pemilu, perbaikan sistem, serta memastikan pemilu tetap demokratis dan siap untuk 2029.

- Ambang batas parlemen:** terdapat wacana untuk mengubah ambang batas parlemen yang berpotensi meningkatkan stabilitas atau membuka sistem politik yang selama ini cenderung eksklusif
- Ambang batas presiden:** MK telah menghapus ketentuan ambang batas presiden yang berpotensi membuka peluang lebih luas bagi partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.
- Keserentakan Pemilu:** mengikuti Putusan MK, salah satu isu yang akan dibahas dalam RUU Pemilu adalah soal waktu pelaksanaan Pemilihan nasional dan daerah

RUU Pemilu masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2026.

1 dari 2 orang muda menilai bahwa tugas dan fungsi polisi cukup hanya untuk sektor keamanan. Namun, pandangan ini tidak diwakili oleh partai manapun.



Anggota polisi aktif dapat menduduki jabatan sipil karena pengalaman dan keahliannya dapat membantu pemerintah

Netral

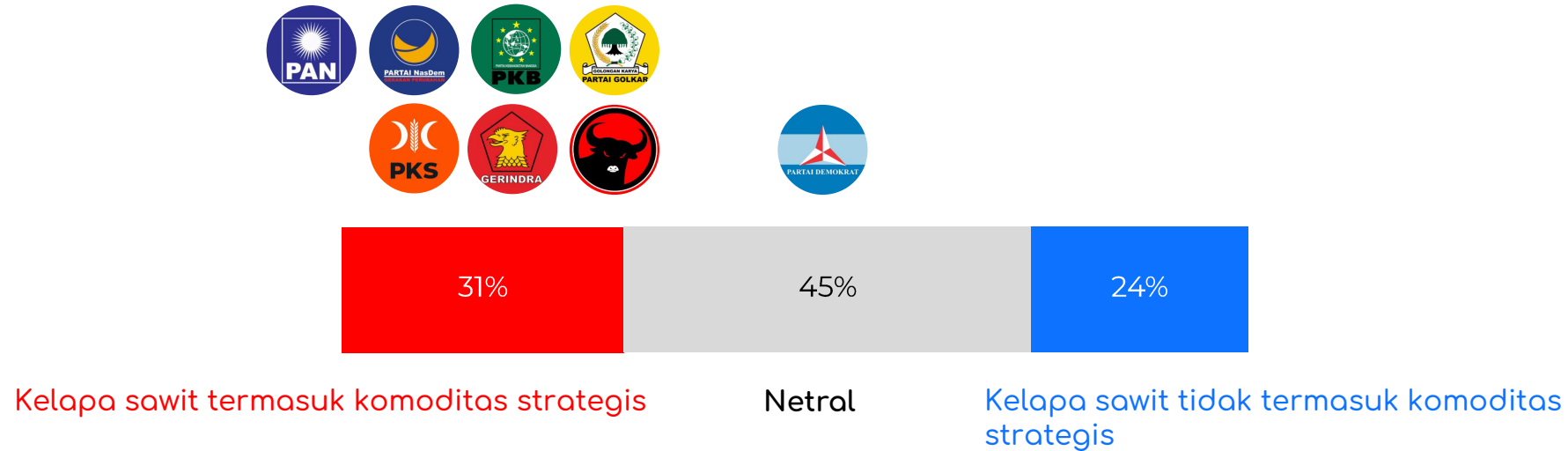
Anggota polisi aktif cukup menjaga keamanan sipil saja, bukan mengurus tugas pemerintahan

UU Polri berfokus pada perluasan wewenang dan penataan ulang struktur Polri.

- Perpanjangan usia pensiun:** dinilai bisa mempertahankan SDM berpengalaman di posisi strategis, tetapi dikhawatirkan memperlambat regenerasi dan menambah penumpukan perwira tinggi.
- Perluasan jabatan dan posisi di ranah sipil:** dalam UU Polri terbaru, anggota polisi aktif dapat mengisi jabatan-jabatan di ranah sipil. Hal ini dinilai dapat mengancam kebebasan pada ruang sipil

RUU Polri telah disahkan menjadi UU Polri pada tanggal 10 Juni 2026.

Hampir sebagian orang muda belum mengetahui hubungan antara kelapa sawit dengan komoditas strategis.

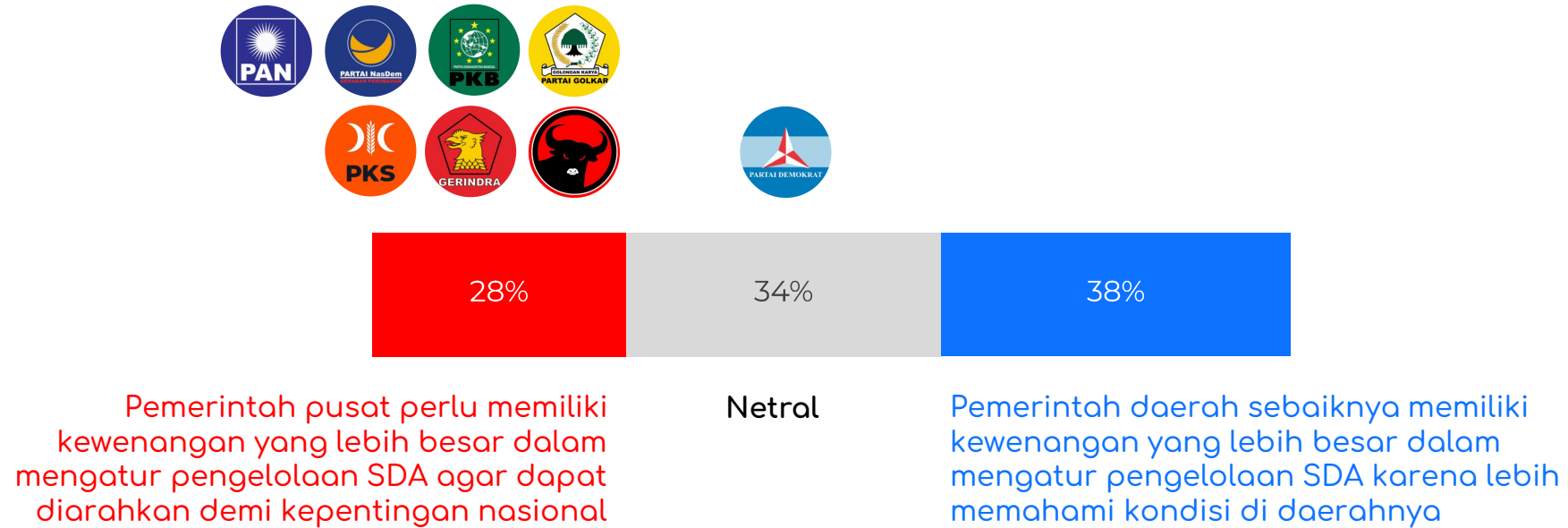


Komoditas strategis merupakan barang dagangan atau hasil bumi bernilai ekonomi tinggi yang berperan penting dalam perekonomian nasional. **RUU Komoditas Strategis** merupakan inisiatif yang bertujuan memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. Sejumlah pihak menilai pengaturannya perlu tetap memperhatikan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat.

- Memusatkan Tata Kelola Komoditas Strategis:** Mengatur pengelolaan komoditas strategis secara lebih terpadu, mulai dari produksi, distribusi, hingga perdagangan, untuk mendukung ketahanan ekonomi dan kepentingan nasional.
- Meningkatkan Kendali Negara atas Komoditas Strategis:** Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah dalam menetapkan dan mengelola komoditas strategis

RUU Komoditas Strategis saat ini sedang dibahas di DPR RI.

Posisi partai terkait sentralisasi SDA dalam RUU Komoditas Strategis cenderung berbeda dari pandangan orang muda.

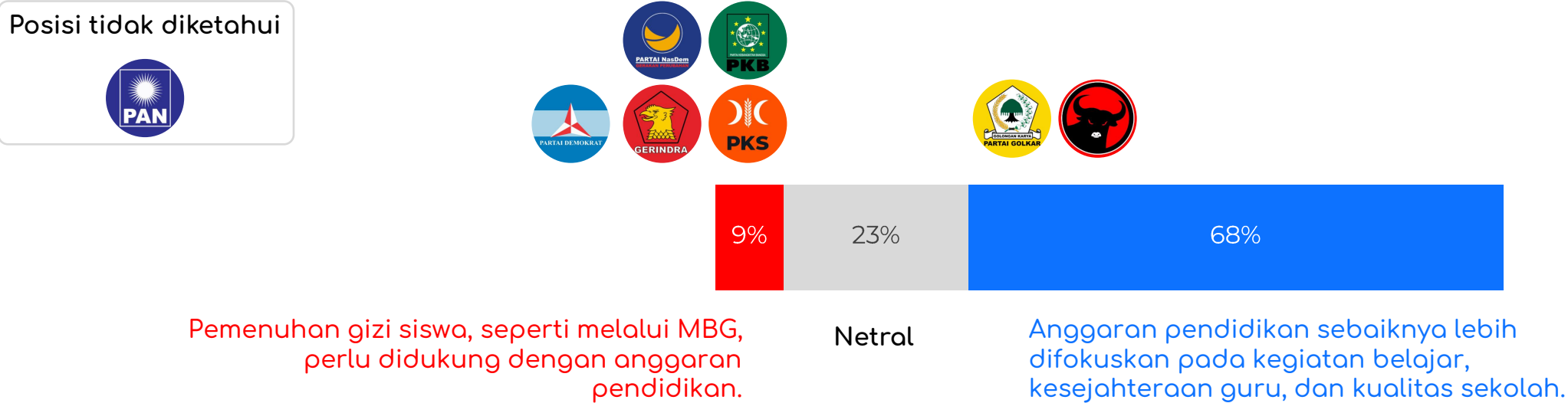


RUU Komoditas Strategis merupakan inisiatif yang bertujuan memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. Sejumlah pihak menilai pengaturannya perlu tetap memperhatikan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat.

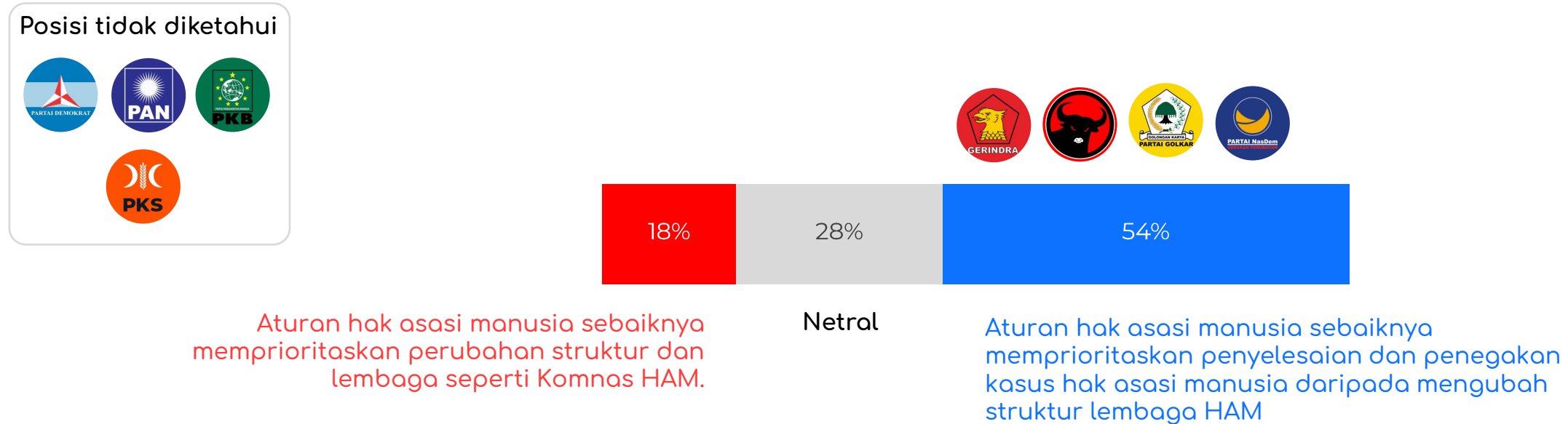
- Memusatkan Tata Kelola Komoditas Strategis:** Mengatur pengelolaan komoditas strategis secara lebih terpadu, mulai dari produksi, distribusi, hingga perdagangan, untuk mendukung ketahanan ekonomi dan kepentingan nasional.
- Meningkatkan Kendali Negara atas Komoditas Strategis:** Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah dalam menetapkan dan mengelola komoditas strategis

RUU Komoditas Strategis saat ini sedang dibahas di DPR RI.

Setidaknya 7 dari 10 orang muda tidak setuju apabila biaya MBG didukung oleh anggaran pendidikan nasional.



Aspek penyelesaian dan penegakan HAM menjadi fokus utama orang muda.



RUU HAM merupakan rancangan kebijakan yang bertujuan memperbarui pengaturan mengenai hak asasi manusia agar lebih sesuai dengan perkembangan tantangan dan kebutuhan perlindungan HAM di Indonesia.

- Penguatan kelembagaan:** Mengatur kembali kewenangan, struktur, dan tata kelola lembaga HAM, termasuk Komnas HAM, agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pemajuan HAM.
- Penegakan Hak Asasi Manusia:** Memunculkan perdebatan mengenai apakah perubahan kewenangan dan tata kelola Komnas HAM akan memperkuat atau justru mengurangi independensi lembaga tersebut.
- Independensi Komnas HAM:** Menjaga kesejahteraan produsen sekaligus memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

RUU HAM masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2026.

Rendahnya skor indeks partai pada Q2 2026 menandakan bahwa belum ada partai di parlemen yang sepenuhnya sejalan dengan aspirasi orang muda

Indeks Partai Politik Parlemen*

base: semua, n= 409

Partai Politik	Skor Indeks Q2 2025	Skor Indeks Q3 2025	Skor Indeks Q4 2025	Skor Index Q1 2026	Skor Index Q2 2026
Demokrat	37,8	42,0	20,5	33,9	28,0
NasDem	37,8	28,6	23,8	23,1	29,1
PKB	37,6	39,1	30,8	29,8	24,3
PDIP	36,5	51,2	43,2	33,9	38,6
Golkar	36,5	31,2	25,0	33,9	39,0
PKS	35,5	47,6	27,8	34,4	24,6
Gerindra	31,7	47,6	25,0	34,8	29,1
PAN	27,9	41,9	20,8	27,3	26,7

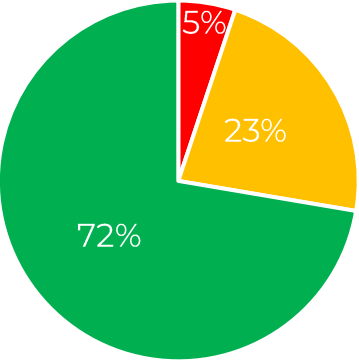
*Penjelasan mengenai indeks partai politik parlemen tersedia di lampiran



7 Persepsi Orang Muda Terhadap Isu Perekonomian Indonesia

7 dari 10 orang muda menilai bahwa melemahnya nilai tukar rupiah (sangat) berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

Pengaruh nilai tukar rupiah
base: semua, n= 409



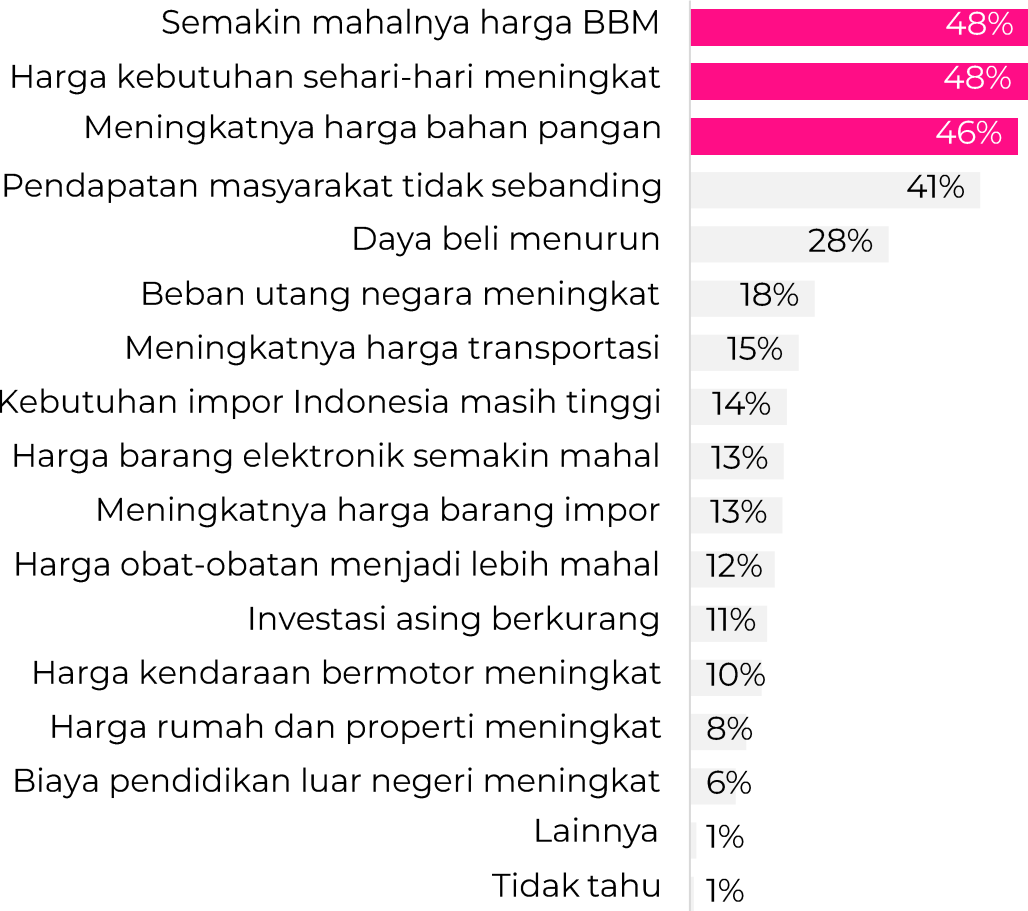
- (Sangat) tidak berpengaruh
- Cukup berpengaruh
- (Sangat) berpengaruh

Nilai tukar rupiah dinilai **sangat berpengaruh** bagi mereka yang masuk pada kategori SES B (78%), sangat terdistribusi (91%), dan sangat tertarik pada isu demokrasi politik (79%)

Nice to know

Saat menanggapi pelemahan rupiah pada Mei 2026, **Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa "orang di desa tidak pakai dolar."** Pernyataan tersebut memicu diskusi publik mengenai pelemahan nilai tukar rupiah berdampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan.

Dampak yang dirasakan dari melemahnya nilai tukar rupiah
base: semua, n= 409

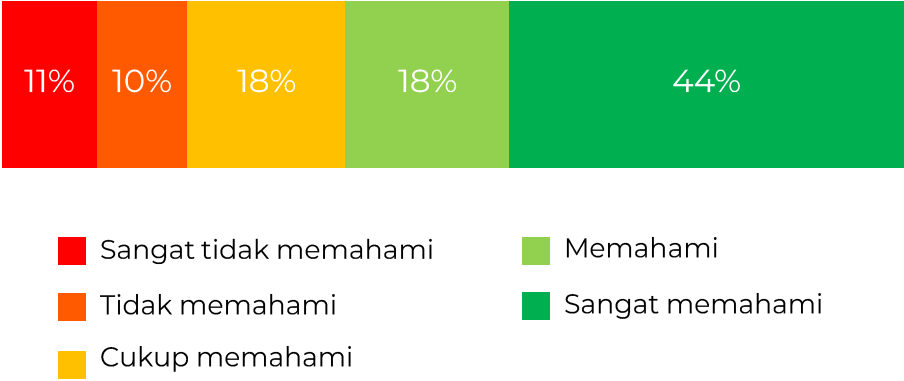


Sebagian besar orang muda sudah memahami arti dan tujuan mengenai penyaluran subsidi pemerintah, juga memiliki opini atas penyalurannya.

Pemahaman orang muda terkait subsidi
base: semua, n=409

	Termasuk	Tidak termasuk	Tidak tahu
Dana pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan	81%	16%	3%
Dana pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha kecil dan menengah	76%	17%	8%
Dana pemerintah untuk bahan bakar Biodiesel (bahan bakar alternatif dari minyak nabati)	70%	20%	10%
Bantuan pemerintah untuk mengurangi biaya listrik yang dibayar masyarakat.	76%	18%	6%
Bantuan pemerintah dalam menyediakan rumah yang terjangkau	71%	22%	7%

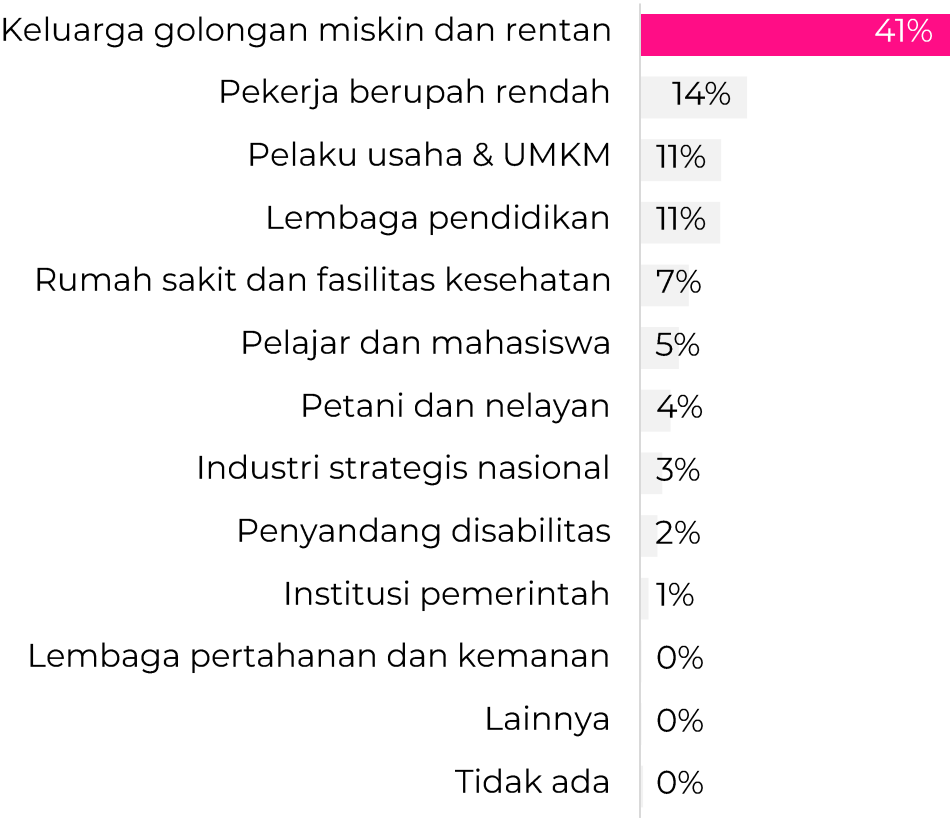
Skala pemahaman konsep subsidi
base: semua, n= 409



Keluarga dari golongan miskin dan rentan (41%) dianggap perlu diprioritaskan oleh pemerintah sebagai penerima subsidi utama.

Pihak yang perlu menjadi prioritas subsidi pemerintah

base: semua, n= 409



Keluarga golongan miskin dan rentan secara signifikan diprioritaskan oleh mereka yang di Pulau Jawa (48%).

Pelaku usaha & UMKM secara signifikan diprioritaskan oleh mereka di wilayah pedesaan (14%), dan mereka yang 26-35 tahun (14%)

Lembaga pendidikan secara signifikan diprioritaskan oleh mereka yang sangat terdistribusi (22%)

Rumah sakit dan fasilitas kesehatan secara signifikan diprioritaskan oleh mereka yang sangat terdistribusi (19%).

Nice to know

APBN 2025 menunjukkan lonjakan anggaran bantuan sosial hingga Rp183 triliun (131% dari alokasi awal) untuk 100 juta lebih penerima. Namun, hasil audit LHP BPK RI 2025 menemukan masalah karena belum sepenuhnya berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi, sehingga berisiko salah sasaran.

Program 19 juta lapangan pekerjaan (46%) dinilai perlu menjadi prioritas anggaran, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan MBG (3%).

Program dan janji yang perlu menjadi prioritas anggaran

base: semua, n= 409



Program BOS secara signifikan diprioritaskan oleh mereka dengan latar belakang pendidikan di perguruan tinggi (18%).

19 juta lapangan pekerjaan secara signifikan diprioritaskan oleh mereka yang moderat (53%) dan mereka yang cenderung terpusat (60%).

BPJS Kesehatan secara signifikan diprioritaskan oleh mereka yang sangat terdistribusi (24%).

Nice to know

APBN 2026 mengalokasikan anggaran untuk program prioritas, antara lain Subsidi **Energi dan Kompensasi (Rp381,3 triliun)**, **Makan Bergizi Gratis (Rp335,0 triliun)**, **Koperasi Merah Putih (Rp83,0 triliun)**, **Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan/PBI JKN (Rp69,0 triliun)**, serta PIP dan KIP Kuliah.

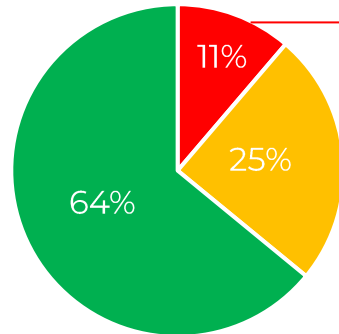


- 8 Ketertarikan orang muda pada isu demokrasi dan politik

Perasaan takut (45%) masih menjadi faktor utama orang muda belum ingin berpartisipasi pada isu demokrasi dan politik,

Ketertarikan terlibat dalam isu demokrasi

base: semua, n= 409



- (Sangat) tidak tertarik
- Agak tertarik
- (Sangat) tertarik

Orang muda yang **(sangat) tertarik** secara signifikan merupakan mereka yang cenderung terpusat (75%) dan sangat terdistribusi (77%).

Orang muda yang **agak tertarik** secara signifikan merupakan mereka yang cenderung terdistribusi (33%) signifikan lebih rendah oleh mereka yang sangat terdistribusi (14%).

Alasan belum ingin berpartisipasi

base: tidak tertarik terlibat dalam isu demokrasi, n= 147

Merasa takut	45%
Merasa kurang kemampuan	25%
Tidak tahu mulai dari mana	21%
Kurang informasi	19%
Tidak punya waktu atau sibuk	19%
Lingkungan sekitar tidak membicarakan	11%
Merasa isu tidak relevan	10%
Topik/isu sulit dipahami	10%
Kurang dirasa penting atau mendesak	9%
Perlu sertifikasi atau pendidikan khusus	8%
Tidak didorong oleh pemerintah	8%
Lainnya	1%

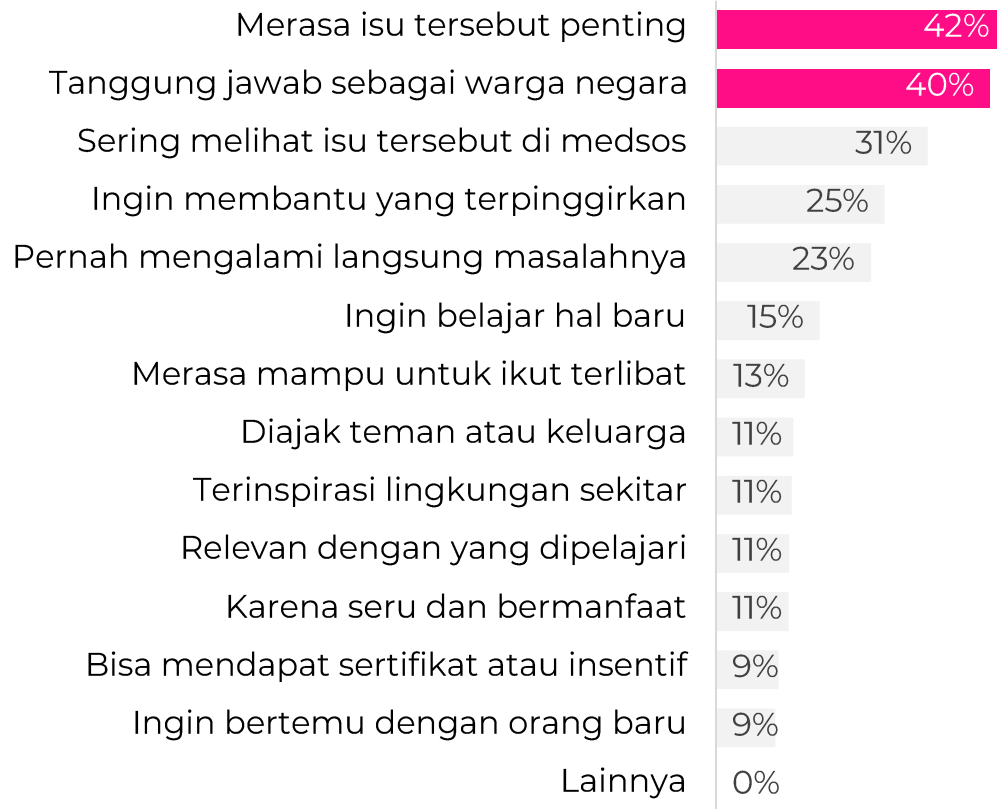
Takut dianggap sok tahu: 19%
Takut berbeda pendapat: 18%
Takut untuk berpartisipasi: 9%

Kurangnya informasi secara signifikan menjadi alasan belum ingin berpartisipasi oleh mereka dengan nilai SES A (35%)

Orang muda merasa adanya urgensi dalam berpartisipasi dalam isu demokrasi dan politik, serta adanya keinginan untuk turut terlibat secara sistemik.

Alasan ingin berpartisipasi

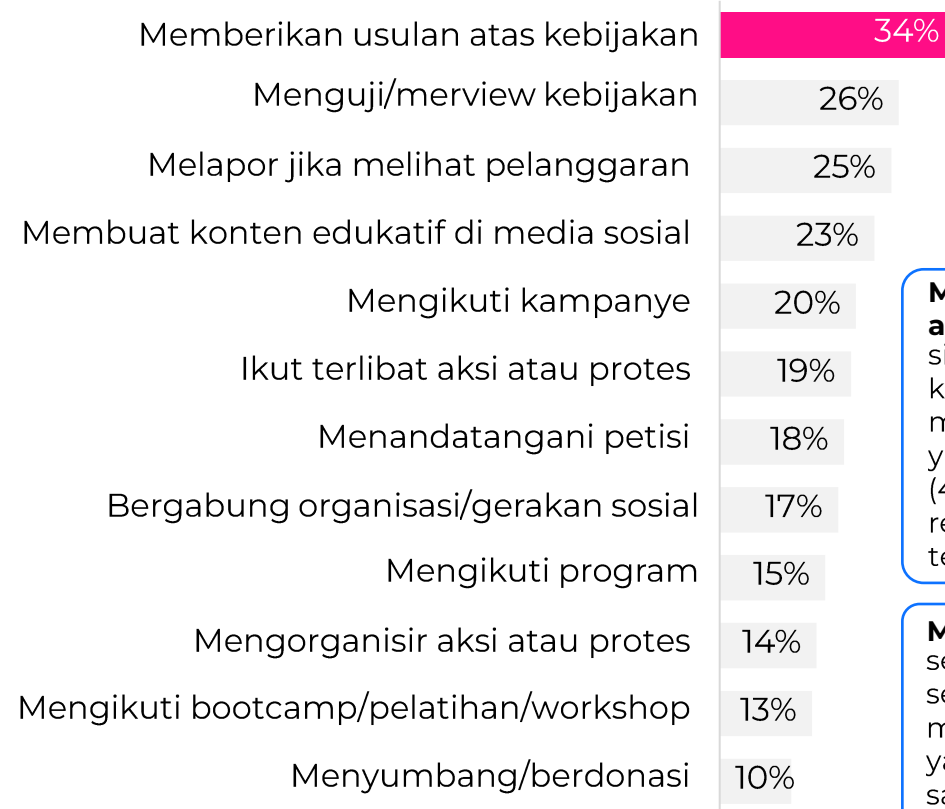
base: tertarik terlibat dalam isu demokrasi, n= 262



Orang muda SES B (50%) secara signifikan ingin berpartisipasi karena **merasa isu tersebut penting** dan dapat berdampak

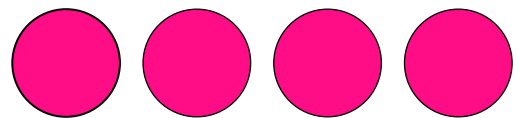
Kegiatan yang menarik

base: tertarik terlibat dalam isu demokrasi, n= 262



Memberikan usulan atas kebijakan secara signifikan dipilih sebagai kegiatan yang menarik oleh mereka yang berusia 26-35 tahun (42%), signifikan lebih rendah oleh cenderung terdistribusi (27%),

Menandatangani petisi secara signifikan dipilih sebagai kegiatan yang menarik oleh mereka yang di perkotaan (26%), sangat terdistribusi (44%).



Lampiran



Voting Advice Application (VAA)

PP17 meluncurkan **Kawula17.id** yang merupakan [Voting Advice Application \(VAA\)](#). Melalui Kawula17.id, (calon) pemilih bisa memeriksa pilihan partai politik yang paling sesuai dengan nilai-nilai politik pemilih berdasarkan isu sosial ekonomi yang diusung oleh partai tersebut dalam kurun waktu tertentu. Isu-isu yang diangkat harus relevan dengan kebutuhan pemilih dan tetap dinamis.

Bagaimana [VAA Kawula17.id](#) bekerja?

Secara sederhana, VAA dapat diibaratkan sebagai kuis yang terdiri dari beberapa set pertanyaan yang disediakan bagi para pengguna. Pertanyaan-pertanyaan ini berisi isu maupun kebijakan yang saat ini sedang dibahas di DPR, serta ramai di kalangan publik. **Pemetaan posisi partai politik** dilakukan untuk setiap isu. Posisi ini didapatkan melalui **desk research** di portal berita maupun **konfirmasi langsung kepada perwakilan partai**. Posisi-posisi partai teridentifikasi sebagai dasar pembuatan VAA. Dari jawaban-jawaban yang terkumpul, Kawula17 mencoba **memetakan pilihan** publik terhadap sikap partai politik pada masing-masing isu yang tersedia. Hasil penelitian ini digunakan untuk menjaga VAA Kawula17 tetap *up to date*.



Sumber: Storyset

Cara membaca *NET Score*

NET Score

Laporan Survei Nasional Kawula17 mencakup penilaian *NET score* yang digunakan untuk memberikan gambaran sederhana tentang seberapa puas/penting sebuah topik.

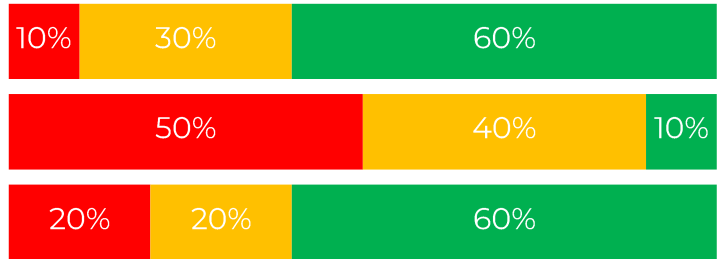
Skor ini diperoleh dengan **mengurangi jumlah respons positif (misalnya sangat puas) dengan respons negatif (misalnya sangat tidak puas).**

NET Score digunakan untuk memudahkan pembacaan arah opini masyarakat secara ringkas serta membandingkan perubahan penilaian antar isu, program, dan periode waktu.



Sumber: Storyset

Contoh:

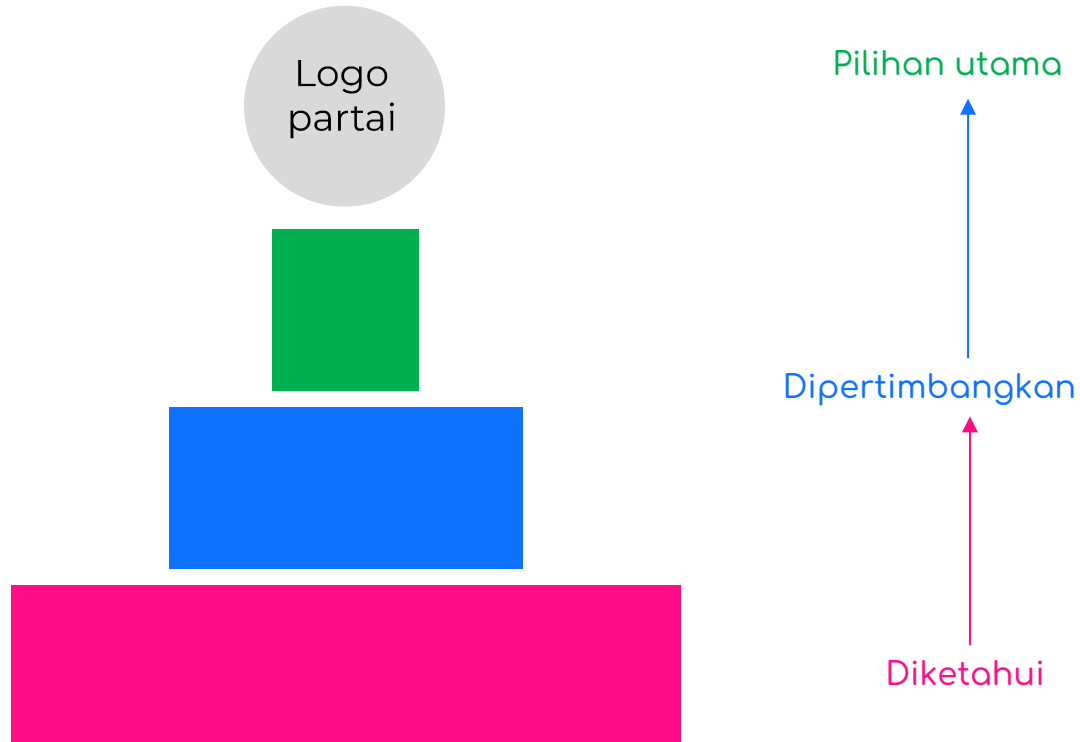


■ (Sangat) tidak puas ■ (Agak) puas ■ (Sangat) puas

NET Score



Cara membaca *funnel* partai politik



Persentase responden yang benar-benar memilih partai ini sebagai pilihan utama mereka. Responden yang bisa menjadikan partai tersebut sebagai pilihan utama hanya responden yang mempertimbangkan partai tersebut.

Persentase responden yang mempertimbangkan untuk memilih partai tersebut. Responden yang bisa mempertimbangkan partai tersebut hanya responden yang mengetahui partai tersebut.

Persentase responden yang mengenal partai ini, meskipun hanya sekadar tahu namanya. Semakin tinggi nilai persentase maka semakin dikenal partai tersebut.

Indeks Partai Politik

Indeks Partai Politik adalah sistem penilaian yang mengukur sejauh mana sikap partai politik selaras dengan preferensi masyarakat terhadap suatu isu. Skor diberikan berdasarkan tingkat kesesuaian posisi partai dengan opini publik, di mana partai yang lebih selaras dengan mayoritas masyarakat mendapat skor lebih tinggi, sementara partai yang berseberangan mendapat skor lebih rendah.

Indeks Partai Politik pada NKS Q2 2026 ditentukan berdasarkan sikap partai politik dan opini masyarakat terhadap UU Polri, RUU Pemilu, RUU Komoditas Strategis, RUU Sistem Pendidikan Nasional, serta RUU Hak Asasi Manusia.

